



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN
DIRJEN BINA KONSTRUKSI DAN DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN
PUPR RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : -
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 6 September 2023
Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d. 17.28 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (F-P. Golkar) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Acara : Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2024
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
38 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
10 dari 12 orang Anggota
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
3. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
4. Ir. Sudjadi
5. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
6. Sri Rahayu
7. Ir. Effendi Sianipar
8. Harvey B. Malaihollo
9. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
10. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
4 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
3. Cen Sui Lan
4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota
 1. Ir. Sumail Abdullah
 2. Sudewo, S.T., M.T.
 3. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 4. Drs. H. Mulyadi, M.MA.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
 4. Drs. H. Soehartono, M.Si.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 5. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
2 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
4 dari 4 orang Anggota
 1. H. Boyman Harun, S.H.
 2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
 3. Athari Ghauthi Ardi
 4. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI (Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng.) beserta jajaran,
2. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI (Ir. Diana Kusumastuti, M.T.) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Dirjen Bina Konstruksi dan Dirjen Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta
jajarannya,
Yang terhormat para Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
dan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah seluruh Indonesia, serta
Hadirin yang kami hormati.**

Mengawali rapat hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi V DPR RI, saat ini Rapat Komisi V DPR RI telah diikuti oleh 25 orang yang hadir dari jumlah 9 fraksi sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka rapat dengar pendapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), Rapat Komisi V DPR RI pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.00 WIB)

Terima kasih kepada Dirjen Bina Konstruksi dan Dirjen Cipta Karya dan beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam RDP hari ini, dan menghadirkan para Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Seluruh Indonesia (BP2JK) dan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Seluruh Indonesia dengan agenda alokasi anggaran, saya ulangi, dengan agenda alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I mitra kerja Komisi V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 yang lalu telah disepakati beberapa hal di antaranya: pagu nota keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024, Kementerian PUPR adalah sebesar 146,98 triliun, dari alokasi tersebut anggaran untuk Dirjen Cipta Karya sebesar 32,70 triliun yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain pembangunan peningkatan spam, penataan pemukiman kumuh perkotaan, rehabilitas dan renovasi sarana dan prasarana sekolah atau madrasah dan dukungan terhadap program padat karya tunai.

Selanjutnya, anggaran Dirjen Bina Konstruksi sebesar 590,51 miliar, yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, pelaksanaan tugas 34 BP2JK, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pelaksanaan pelatihan atau sertifikasi SDM vokasional bidang konstruksi. Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami ingin tegaskan agar dalam proses penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2024 masing-masing unit organisasi Eselon I benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran, masukan dari Komisi V DPR RI. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya Pasal 80 huruf j yang berbunyi:” *Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan*”.

Selanjutnya, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bina Konstruksi antara lain: perlu meningkatkan program padat karya tunai di daerah dengan mengakomodir saran dan masukkan Komisi V DPR RI. Kedua, perlu meningkatkan evaluasi terhadap setiap tahap dan proses tender dalam mewujudkan pelaksanaan tender yang lebih transparan dan akuntabel. Ketiga, perlu untuk memperluas pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM di bidang konstruksi.ssss

Demikian pengantar dari kami.

Selanjutnya kami, atau selanjutnya kepada Dirjen Bina Konstruksi dan Dirjen Cipta Karya untuk menyampaikan penjelasannya sesuai dengan agenda rapat hari ini. Mana duluan, Cipta Karya atau? silakan Ibu, Cipta Karya, Dirjen.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Bismillahirrahmanirrahiim.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi V DPR RI dan juga yang kami hormati para Anggota Komisi V DPR RI, Bapak Dirjen Bina Konstruksi beserta jajarannya, dan tentunya teman-teman Ka.Balai BP2JK provinsi yang hadir juga disini, kemudian juga para Pejabat Tinggi Pratama yang kami hadirkan juga Bapak bersama-

sama di ruang ini serta seluruh Ka.Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan juga balai teknik yang ada di Cipta Karya hadir semuanya, Bapak, di atas bersama-sama kita,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Om swastiastu.

Pimpinan yang kami hormati,

Hari ini kami ada tiga hal yang kami sampaikan yang pertama adalah masalah kronologis alokasi anggaran tahun 2024. Kemudian dua adalah prioritas penganggaran dan juga target prioritas tahun 2024. Menindaklanjuti tentunya Raker Komisi V DPR RI yang kemarin dilaksanakan bersama Bapak Menteri PUPR. Untuk rencana anggaran tahun 2024, Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai dengan surat edaran bersama pagu indukatif yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan dan menteri Bappenas serta yang telah ditindaklanjuti oleh surat Menteri PUPR Nomor KU 0101 tanggal 24 Mei 2023, perihalnya adalah penyesuaian pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2024. Pagu indikatif Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2024 ini, pertama adalah 27 triliun, namun selanjutnya sesuai dengan surat bersama pagu anggaran 2024 ini tanggal 31 Juni dan juga surat Menteri PUPR tanggal 15 Agustus tahun 2023 ada penyesuaian pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 maka pagu anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya ini ditetapkan sebesar 32,7 triliun. Ini terdapat penyesuaian anggaran sebesar 5,7 triliun yang terdiri dari tambahan kegiatan penugasan yang sudah *committed* ini sebesar 5,75 triliun dan juga ada penyesuaian pengurangan pagu PHLN sebesar 50 Miliar. Tambahan kegiatan *committed* ini untuk penugasan ini sebesar 5,75 ini triliun ini yang pertama untuk dukungan IKN, antara lain untuk pembangunan IPA (Instalasi Pengelolaan Air), kemudian pengelolaan limbah dan juga persampahan, penataan bangunan dan juga kawasan KIPP IKN. Dan yang kedua ini untuk dukungan KSPN Borobudur ya, ini berupa penataan kawasan kampung seni di Kujon ya dan museumnya dan juga pembangunan TPA Pasuruhan di Kabupaten Magelang.

Kemudian yang ketiga ini juga ada renovasi stadion ya antara lain 20 stadion antara lain di sini adalah Stadion Bumi Sriwijaya di Kota Palembang, kemudian Stadion Wibawa Mukti di Jawa Barat, Stadion Segiri Kalimantan Timur, Stadion Gelora BJ Habibie di Sulawesi Selatan ya, kemudian yang keempat ini adalah untuk renovasi pasar ya, pasar ini antara lain adalah Pasar Natar yang ada di Lampung, Pasar Sila yang ada di Bima ya, kemudian ada dukungan yang kelima adalah dukungan sarana pendidikan ya, ini untuk Universitas Syekh Nawawi Al Bantani antara lain ya kemudian juga ada sekolah di Arab Saudi dan di Malaysia.

Kemudian yang keenam ini juga untuk mendukung bangunan gedung dan cagar budaya. Ini juga kita melakukan pembangunan KBRI di Malaysia,

ini ada surat-suratnya dari para menteri yang meminta kepada Kementerian PUPR untuk melakukan pembangunan ini. Kemudian penataan kawasan Keraton Kasunanan Surakarta dan yang kedelapan ini adalah untuk mendukung pembangunan SPAM Afulu di Nias Utara.

Selanjutnya sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Menteri PUPR pada kesempatan Raker yang lalu, prioritas penganggaran tahun 2024 Direktorat Jenderal Cipta Karya ini diprioritas pertama adalah untuk menyelesaikan kegiatan kontrak tahun jamak MYC ya dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah *committed* lainnya ya, seperti kegiatan pendanaan PHLN ya SBSN serta kegiatan fungsi pendidikan. Kedua adalah untuk optimalisasi infrastruktur yang telah terbangun ya. *Nah*, agar tentunya yang infrastruktur yang telah terbangun ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan yang ketiga ini adalah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penugasan oleh Bapak Presiden. Sejalan dengan prioritas penganggaran yang telah kami sampaikan tadi ya, ini kami sampaikan juga pohon anggarannya dari Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk rencana pemanfaatan sebesar 32,7 triliun, rinciannya ada program dukungan manajemen ini sebesar 0,99 triliun ini digunakan untuk pemenuhan wajib antara lain berupa gaji, tunjangan, kemudian operasional perkantoran.

Kemudian untuk program perumahan permukiman ini sebesar 31,71 triliun, ini terdiri dari rupiah murninya sebesar 28,84 triliun dan PHLN-nya 2,87 triliun. Kemudian anggaran rupiah murni untuk program perumahan permukiman yang sebesar 28,84 triliun ini rinciannya digunakan untuk membiayai kegiatan fungsi pendidikan, ini sebesar 2,99 triliun ini termasuk kegiatan MYC ya. Kemudian kegiatan optimalisasi fungsi atau OPOR ya ini antara lain adalah untuk perbaikan-perbaikan SPAM, TPA, optimalisasi dan juga pemeliharaan untuk kawasan strategis pariwisata nasional, ini antara sebesar 0,32 triliun. Kemudian ada juga cadangan darurat ini untuk mobilisasi peralatan, tanggap darurat dan juga cadangan penanganan untuk penanganan mendesak ya, dan juga bencana, kami alokasikan sebesar 0,17 triliun.

Kemudian selain itu, juga ada kegiatan dengan skema SBSN ini sebesar 0,48 triliun, ini kegiatannya adalah untuk penanganan sistem penyediaan air minum yang ada di Jatiluhur. Kemudian kegiatan yang berbasis infrastruktur yang berbasis masyarakat ini sebesar 2,11 triliun ini termasuk untuk penanganan kemiskinan ekstrem ya. Kemudian pemenuhan kegiatan MYC, ini kegiatan-kegiatan yang sudah *committed* terkontrak dan juga penugasan non anggaran pendidikan dan juga IKN ini sebesar 10,58 triliun, ada MYC-nya lanjutan sebesar 7,93 triliun, MYC baru untuk kegiatan penugasan atau direktif itu sebesar 2,65 triliun dan juga pembayaran hutang eskalasi itu sebesar 0,03 triliun.

Kemudian juga ada kegiatan dukungan teknis lainnya ini sebesar 0,76 triliun dan untuk dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini sebesar 11,4 triliun. Perlu kami sampaikan bahwa total pagu yang kami sampaikan sebesar ini belum memperhitungkan kebutuhan untuk DOB Papua dan Papua Barat, ini

belum masuk karena ini nanti akan ada tambahan lagi dari Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, kami sampaikan juga rincian rencana kegiatan per unit Eselon II. Ini untuk sektor air minum ini anggarannya sebesar 4,09 triliun, kegiatan prioritas antara lain untuk pembangunan dan peningkatan SPAM ini untuk kapasitas 2.985 liter per detik, ini antara lain untuk SPAM Bintang Bano di Sumbawa Barat, kemudian SPAM IKK Gunung Sitoli, SPAM IKK Tapung Hulu ya di Kampar, kemudian SPAM IKK Katulampa Bogor, SPAM regional Kamijoro, SPAM Afulu Nias Utara, SPAM Gane Timur Halmahera Selatan, SPAM regional Wosusokas di Jawa Tengah, SPAM regional Benteng Kobema di Bengkulu, kemudian prasarana air minum IKN ini berupa IPA, jaringan distribusi umum, jaringan distribusi primer untuk SPAM Sepaku ya dan juga jaringan interkoneksi IPA Sepaku Semoi ya.

Kemudian untuk perluasan SPAM sebanyak 20.638 sambungan rumah ini untuk memenuhi SPAM regional Jatiluhur 1 Kabupaten Kerawang dan Bekasi, SPAM regional Burana di Bali ya dan juga untuk SPAM berbasis masyarakat, ini berada di 1.183 desa, ini adalah untuk kegiatan berupa Pamsimas ya.

Kemudian untuk sektor sanitasi ya, anggarannya adalah sebesar 5,26 triliun, ini kegiatan prioritasnya adalah pertama untuk sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK, ini antara lain untuk Jakarta *sewage development project* zona 1, kemudian pembangunan IPLT Samosir, optimalisasi SPALD-T untuk Kota Banda Aceh, kemudian prasarana sanitasi IKN, untuk IPAL 1, 2 dan 3 di kawasan inti pusat pemerintahan.

Kemudian untuk yang kedua adalah sistem pengelolaan persampahan, ini untuk layanan 231.000 KK ya, yang antara lain untuk TPA Samosir, TPA Pasuruhan di Magelang, kemudian TPA Cikalong di Cianjur ini untuk pasca bencana kemarin dan juga beberapa TPST di Sementul, Banyuwasin, Gianyar, Bandung, Cimahi, Bekasi, Indramayu, Depok, Cianjur, kemudian Cilegon, Padang, Tuban dan juga Nias Utara, serta prasarana persampahan IKN ini ada TPST dan juga di kawasan pusat pemerintahan. Kemudian sanitasi yang berbasis masyarakat ini juga layanannya berupa Sanimas ini SPALD-S di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi dan sanitasi di lembaga pendidikan keagamaan itu di 1.279 lokasi.

Kemudian untuk sektor pengembangan kawasan permukiman dan juga anggaran, dengan anggaran sebesar 2,62 triliun, ini kegiatan prioritas antara lain adalah untuk penataan kawasan strategis pariwisata nasional dan juga untuk kegiatan strategis lainnya ini seluas 352 hektar antara lain adalah KSPN Bromo-Tengger-Semeru tahap 2 dan 3, kemudian juga penataan kampung seni dan museum Borobudur di Kujon Magelang, kemudian penataan kawasan Waterfront Marina dan Keraton Lia ini di Wakatobi dan juga penataan kawasan Malalayang Bunaken yang tahap dua, kawasan Dieng, kemudian kawasan, penataan kawasan yang mendukung rumah khusus eks Timor Timur, kemudian penataan kawasan Gelora Sumbawa dan juga penataan kawasan

Monas, penataan kawasan Kumbu Selambai di Lok Tuan Bontang ya, kemudian penyiapan kawasan IKN, ini ada sumbu kebangsaan tahap 2, sumbu Tripraja dan juga kawasan Beranda Nusantara, *landscape* IKN serta ada proteksi, sistem proteksi kebakaran di IKPP.

Kemudian selain itu juga, ada pembangunan infrastruktur pemukiman yang berbasis masyarakat, ini melalui program PISEW, ini di 738 kecamatan. Kemudian untuk sektor penataan bangunan gedung anggarannya sebesar 9,61 triliun, kegiatan prioritasnya antara lain adalah pertama pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung ini di 27.720 meter persegi, antara lain adalah pembangunan gedung pusat amanah Aceh, kemudian *memorial living park* di Pidie, ada Mako Paspampres, gedung Koni, rehabilitasi bangunan kantor di Kabupaten Sigi, rekonstruksi Masjid Syuhada, terus juga Gedung DPRD Sulawesi Barat, krematorium Batam serta bangunan Lanud Sulaiman di Jawa Barat dan ada pembangunan KBRI Malaysia.

Yang kedua adalah pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di lima (5) kawasan, ini termasuk antara lain adalah rehabilitasi benteng Willem Ambarawa, penataan kawasan Borasi Manukwari, kawasan Kasunanan Surakarta dan makam Kesultanan Pontianak serta TSTH Polung yang ada di Sumatera Utara. Kemudian pembangunan bangunan gedung penataan kawasan IKN ini sebanyak 13 unit, ada gedung pusat pemerintahan I dan II, gedung kawasan kantor kementerian koordinator ada empat (4) Kemenko dan juga gedung dan kawasan kantor Setneg dan juga masjid negara serta nantinya bangunan kantor Otorita IKN.

Kemudian untuk sektor sarana pendidikan dan... sarana pendidikan ini anggarannya 2,99 triliun ya, prioritasnya adalah untuk rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah madrasah yang kondisinya adalah rusak berat ini ada 328 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk juga sekolah di Arab Saudi di Jeddah dan Riyadh serta di Malaysia. Kemudian pembangunan dan rehabilitasi PTN, PTKIN, ini ada 17 unit termasuk pembangunan gedung gelanggang inovasi dan kreativitas UGM, Universitas Haluoleo, gedung UIN Antasari Banjarmasin, kemudian gedung Universitas Malikulsaleh Aceh, kemudian gedung Universitas Andalas, gedung Universitas Tadulako dan juga laboratorium lapangan geologi di UGM ya. Kemudian sektor sarana olahraga dan pasar ini juga anggarannya sebesar 5,86 triliun, kegiatannya adalah rehabilitasi dan renovasi pasar ini sebanyak 25 pasar ya, renovasi antara lain untuk Pasar Natar, Pasar Pasir Gintung di Lampung, Pasar Godean di DIY, Pasar Banjasari di Pekalongan, Pasar Jongke Surakarta, Pasar Baros di Serang, kemudian juga Pasar Kolpajung di Madura, kemudian Pasar Raya Kota Padang dan juga Pasar Banyuwangi.

Kemudian pembangunan prasarana olahraga ini ada 25 unit, ini adalah pembangunan untuk prasarana PON Aceh dan Sumut ada 13 *venue*, kemudian renovasi stadion Sumatera Utara untuk PON juga di Medan, kemudian pembangunan *venue* dayung PON ini juga Aceh, pembangunan asrama Pengalengan, serta renovasi 21 stadion ya, termasuk Stadion Teladan Medan, GBLA Bandung, Mandala Krida di Jogja, Segiri Mandara, Gelora BJ Habibie

Pare-Pare, Demah Lemang Banjar dan juga termasuk Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Kemudian ada juga Cibubur *sport center* dan juga *paralympic training center* di Karanganyar. Dukungan teknis ini sebesar 1,28 triliun, ini antara lain adalah kegiatan Turbinwas dan juga perencanaan bidang Cipta Karya, advis teknis keandalan bangunan gedung dan juga kawasan permukiman fasilitas Pusat Studi Kegempaan (PuSGeN) yang tentunya juga akan melibat dan kerja sama dengan kementerian/lembaga seperti BMKG, BRIN, BNPB, BIG, Perhubungan dan juga kerja sama, ESDM dan juga akademisi ITB, UI, UGM, Undip ya serta asosiasi praktisi yang juga untuk memutakhirkan kajian-kajian yang terkait kegempaan di Indonesia, studio permodelan dan juga GIS ya.

Kemudian juga ada cadangan tanggap darurat, ini untuk penanganan bencana yang mendesak, ser... ini tetap harus kita alokasikan serta penerapan teknologi di bidang air minum serta sanitasi.

Kemudian dukungan manajemen ini juga sebesar 0,99 triliun, ini untuk gaji tunjangan operasional kantor, administrasi, kesatkeran dan juga pengelolaan SDM, manajemen keuangan serta pengelolaan BMN serta penyusunan laporan kinerja dan implementasi dari manajemen risiko serta pembinaan hukum dan komunikasi publik.

Ibu-Bapak hadirin sekalian yang saya hormati,

Untuk rencana pelaksanaan kegiatan dengan pola padat karya tahun 2024 ini dialokasikan sebesar 2,1 triliun, ini termasuk dengan *safe guarding*-nya dan perkiraan serapan tenaga kerja itu 47.000 orang. PISEW itu di 738 lokasi dengan serapan sebelas ribu tujuh puluh lima ribu orang tenaga kerja. Kemudian untuk Sanimas itu di 1.546 lokasi, ini dengan serapan lima belas ribu empat ratus lima lima ribu orang tenaga kerja.

Kemudian sanitasi untuk lembaga pendidikan keagamaan ini di 1.279 lokasi, ini dengan serapan tujuh ribu enam ratus empat delapan ribu orang tenaga kerja dan TPS3R, ini di 173 lokasi dengan serapan seribu tujuh ratus dua puluh dua ribu orang tenaga kerja. Pamsimas itu di 1.183 lokasi dengan serapan sebelas ribu delapan ratus dua puluh sembilan ribu orang tenaga kerja, serta untuk dukungan penanganan kemiskinan ekstrem, ini ada di 15 lokasi.

Dan perlu kami sampaikan juga Pimpinan beserta Anggota, ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan IBM tahun 2024, ini secara garis besar direncanakan dengan *timeline*-nya sebagai berikut. Kami mengusulkan untuk pengajuan usulan ini bisa disampaikan dengan sampai dengan akhir bulan Oktober 2023 ya, kemudian kami lanjutkan nanti karena perlu verifikasi usulan hingga minggu ketiga Desember 2023 dan kami setelah itu baru bisa mempersiapkan, menetapkan SK menteri mulai dari bulan Desember sampai akhir bulan Januari 2024 ya. Setelah itu kami tentunya harus merekrutmen dan mobilisasi serta melakukan pelatihan TFL fasilitator itu dari minggu ketiga bulan November 2023 sampai dengan minggu pertama 2024. Jadi mungkin nanti

sedikit agak *overlap* ini kami harapkan supaya bisa lebih cepat untuk penanganannya.

Sosialisasi penyusunan DED, RAB, penyusunan RKAM ini pun juga kami harapkan sampai dengan akhir bulan, tahun Juni 2024 dan nanti kami harapkan penyusunan PKS, konstruksi dan juga pencairan BLM-nya bisa kami selesaikan sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2024, dan kami harapkan nanti kami bisa melakukan serah terima dan juga untuk pemanfaatannya ini sampai dengan akhir bulan Oktober 2024, ini untuk itu mungkin bisa kita sepakati bersama *timeline* yang kami usulkan untuk percepatan pengusulannya ini.

Dan khusus untuk tahapan penjaringan, verifikasi usulan ini untuk usulan kegiatan IBM tahun 2024 ini dapat dimulai disampaikan pada pertengahan bulan September 2023 ini dan kami harapkan seluruh usulan ini sudah dapat masuk kami semuanya itu di bulan Oktober 2023 ya, agar kami bisa melakukan untuk proses verifikasi ya seperti apa yang tertera di dalam paparan kami. Dan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi atas kajian KPK seluruh rangkaian penjaringan usulan kegiatan infrastruktur yang berbasis masyarakat atau padat karya ini, kita lakukan secara *online* ini melalui *website* Kementerian PUPR yang saat ini sudah disusun oleh sekretariat jenderal, ya di Setjen.

Dan terakhir, kami sampaikan bahwa rencana dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara tahun 2024, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mengalokasikan sebesar 11,4 triliun, ini rencana kegiatannya sektor air minum, ini anggarannya 0,8 triliun untuk pembangunan JDU, JDP SPAM Sepaku tahap dua dan juga jaringan interkoneksi IPA di Sepaku Semoi ya, karena kebutuhannya adalah 1.000 liter per detik dan kami akan mencoba untuk menyelesaikan ini. Sektor sanitasi ini anggarannya adalah sebesar 1,61 triliun, ini untuk memenuhi prasarana untuk pembangunan IPAL, limbah ya di... ada tiga, untuk kawasan inti pusat pemerintahannya dan juga untuk tempat pengelolaan sampah terpadu, ini di kawasan KIPP ya.

Kemudian untuk sektor pengembangan kawasan permukiman anggarannya 1,06 triliun, ini untuk pembangunan Sumbu Kebangsaan tahap 2, sumbu Tripraja, kemudian juga kawasan Beranda Nusantara dan juga untuk penyelesaian *landscape* IKN dan juga kami memenuhi juga sistem proteksi kebakarannya di kawasan inti pusat pemerintahan.

Untuk sektor bina penataan bangunan ini anggarannya 7,91 triliun, ini kami menyelesaikan untuk pembangunan gedung pusat pemerintahan 1 dan 2, ini istana presiden kemudian juga istana wakil presiden ya, kemudian juga gedung dan kawasan kantor kementerian, 4 Kemenko kemudian juga gedung dan kawasan kantor Setneg, masjid negara dan nanti juga akan ada kantor Otorita IKN.

Kemudian perencanaan dan manajemen untuk anggarannya, kami alokasikan 0,06 triliun untuk perencanaan dan pengendalian IKN serta dukungan teknis untuk pengadaan tanah.

Demikian Pimpinan dan para Anggota Komisi V yang bisa kami sampaikan. Untuk rincian rencana usulan anggaran tahun 2024 ini yang total anggarannya 32,7 triliun. Untuk itu kami mohon arahan selanjut dari Pimpinan dan juga Anggota Komisi V.

Terima kasih dan *wabilahitaufik walhidayah*.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih, Bu Dirjen.

Lanjut, Dirjen Bina Konstruksi.

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA, M.Eng):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

**Yang kami hormati dan kami banggakan Pimpinan Komisi V DPR RI,
Para Anggota Komisi V DPR RI,
Ibu Dirjen Cipta Karya beserta jajarannya,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om swastiastu.

Memenuhi undangan RDP pada kesempatan siang ini telah hadir secara luring Bapak Pimpinan, sekretaris, para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta 34 Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi serta 7 Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah, jadi tidak ada yang absen Bapak, hadir semuanya.

Bapak-Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Izinkan kami dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyampaikan paparan sesuai dengan topik pada RDP hari ini, ada 5 topik yang akan kami sampaikan. Pertama terkait dengan pagu anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun 2024, program prioritas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di Tahun Anggaran 2024, kemudian yang ketiga target pembinaan tenaga kerja

konstruksi Tahun Anggaran 2024, kemudian rencana tender dini serta rekrutmen pengurus LPJK periode tahun 2025-2028 karena yang pengurus saat ini akan habis di bulan Desember 2024, Bapak.

Berikut kami sampaikan kronologis pagu anggaran 2024 untuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahap *review* angka dasar pada bulan Januari alokasi Ditjen Bina Konstruksi diusulkan sebesar Rp867,3 miliar. Kemudian selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023 ditetapkan pagu indikatif Ditjen Bina Konstruksi sebesar 578 miliar sesuai dengan surat Menteri Keuangan dari Pak menteri kepada Menteri Keuangan Nomor KU0101 MN 1138 pada tanggal 24 Mei.

Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2023 yang disahkan pada saat Rapat Kerja tanggal 30 Agustus dengan Komisi V DPR RI ditetapkan pagu anggaran Ditjen Bina Konstruksi menjadi sebesar Rp590,5 miliar. Adapun rincian pagu anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa dari total anggaran Rp590,5 miliar, pagu anggaran Ditjen Bina Konstruksi sebanyak 193,4 miliar atau sebesar 32,8% akan dialokasikan sebagai belanja pegawai yang digunakan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai di 48 Satker di Ditjen Bina Konstruksi. Kemudian sebanyak Rp87,1 miliar atau sekitar 14,7% akan dialokasikan dalam belanja barang operasional yang diperuntukkan sebagai biaya pemeliharaan aset, biaya langganan daya dan jasa serta belanja operasional lainnya di 48 Satker. Kemudian sebanyak Rp20 miliar atau sebesar 3,4% akan dialokasikan dalam belanja modal untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan alat pengolah data dan perkantoran di 48 Satker serta perbaikan bangunan gedung di kantor, di 8 balai BP2JK.

Kemudian sisanya sebesar Rp290 miliar atau 49,1 miliar akan dialokasikan dalam belanja barang non operasional di pusat dan balai yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan jasa konstruksi.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Kami sampaikan pula bahwa Ditjen Bina Konstruksi pada tahun anggaran 2024 memiliki beberapa program prioritas antara lain terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi, kelembagaan dan dukungan material peralatan konstruksi dan teknologi, kompetensi tenaga kerja konstruksi, pengadaan jasa konstruksi, keberlanjutan konstruksi serta layanan dukungan manajemen. Dari beberapa program prioritas ini ada yang merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden seperti revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan revisi PP 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi serta Monitoring Evaluasi Capaian Sasaran, Nilai, Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Selain itu, terdapat beberapa program prioritas terkait tindak lanjut strategis nasional pencegahan korupsi atau Stranas PK seperti Bimtek,

prakonstruksi dan operasionalisasi EHPS atau sistem informasi HPS integrasi atau Sipasti serta tindak lanjut, tindak lanjut instruksi Menteri PUPR seperti monitoring evaluasi, penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, implementasi sistem informasi manajemen pengalaman atau simpan dan implementasi *e-katalog* PUPR.

Ditjen Bina Konstruksi juga akan melakukan rekrutmen pengurus LPJK periode 2025-2028.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Saat ini kami didampingi oleh Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK sedang melakukan modernisasi pengadaan barang dan jasa melalui transformasi digital dengan mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi di mana di dalam SJKT ini terdapat beberapa sistem di antaranya, yang pertama adalah sistem informasi HPS terintegrasi atau Sipasti yang digunakan sebagai dasar perhitungan HPS untuk seluruh proyek Kementerian PUPR yang akan dimulai tahun 2024. Progres saat ini sedang penerapan masing-masing di satu paket *pilot project* di Direktorat Jenderal SDA, Ditjen Bina Marga dan Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan di mana di setiap provinsi ada satu sampel untuk setiap direktorat jenderal sehingga terkumpul 136 proyek sebagai sampel.

Kemudian yang kedua adalah sistem informasi manajemen pengalaman atau simpan untuk mencatat pengalaman usaha penyedia jasa, apakah itu tenaga ahli maupun badan usaha jasa konstruksi yang terverifikasi oleh pengguna jasa. Sistem ini terintegrasi dengan SPSE dan berlaku secara nasional dengan adanya simpan, Pokja akan lebih cepat melakukan evaluasi tender untuk pekerjaan konstruksi di mana terjadi efisiensi dari 45 hari menjadi 22 hari dan seleksi jasa konsultasi dari 60 hari menjadi 34 hari. Proses registrasi pengalaman saat ini progresnya adalah 9.468 badan usaha jasa konstruksi dengan... dengan 127.587 pengalaman usaha dan 65.270 tenaga ahli dengan 494.573 pengalaman profesional.

Kemudian yang ketiga adalah sistem informasi material dan peralatan konstruksi atau SIMPK ini adalah kami menginisiasi registrasi alat-alat berat pre konstruksi Kementerian PUPR yang juga akan dimulai tahun 2024 di mana progres permohonan pencatatan hingga saat ini sebanyak 5.414 peralatan dan 156 material di mana yang sudah tercatat sebanyak 513 peralatan dan 140 material.

Kemudian yang berikutnya adalah sistem informasi kontrak dan manajemen merupakan pengendalian pelaksanaan kontrak atau Sikompak di mana inisiasi data kontrak elektronik, paket pekerjaan konstruksi Kementerian PUPR yang juga akan dimulai tahun 2024. Progres saat ini sedang dilaksanakan *pilot project* penerapan kontrak pada paket-paket di IKN. Melalui sistem-sistem tersebut diharapkan dapat kita proses kualitas PBJ yang lebih baik dengan meminimalisir praktek kecurangan dalam evaluasi tender, serta meminimalisir kesalahan *input* data pengalaman di dalam dokumen.

Kemudian pembangunan infrastruktur lebih tepat waktu karena adanya percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian terujinya transparansi dan kepercayaan publik serta persaingan yang lebih sehat dan kompetitif antar penyedia. Saya kira ini, isu ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan sidang pada awal sidang tadi.

Kemudian konsep dari modernisasi konsekuensi dari modernisasi PBJ, maka untuk sementara akan berdampak pada penurunan ketersediaan tenaga kerja konstruksi atau TKK yang bersertifikat. Namun demikian, jika melihat kebutuhan dasar untuk pemenuhan tanggung jawab teknis badan usaha yang menjadi isu besar, kemudian peranggung jawab subklasifikasi badan usaha, badan usaha atau PJSKBU maka secara kumulatif ketersediaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat telah mencukupi dengan jumlah sebanyak 177.334 orang di mana sertifikat yang didapatkan adalah sebanyak 226.047 sertifikat.

Data yang ditampilkan merupakan peta kebutuhan TKK atau Tenaga Kerja Konstruksi berdasarkan persyaratan permohonan SBU di mana terdapat *gap* kekurangan tenaga kerja konstruksi sebesar 28.056 orang untuk jenjang 5 dan 63.334 orang untuk jenjang 6. Namun demikian, *gap* ini dapat dipenuhi dari tenaga kerja konstruksi bersertifikat pada jenjang di atasnya yaitu jenjang 7 sampai dengan 9 sehingga secara total terdapat surplus sebanyak 6.338 orang. Melihat kebutuhan tenaga kerja konstruksi terhadap kesediaan tenaga kerja konstruksi saat ini maka konsep pembinaan tenaga kerja konstruksi akan kami prioritaskan untuk jenjang 1 sampai dengan 3 untuk pemenuhan tenaga kerja konstruksi terampil dan jenjang 4 sampai dengan 6 untuk mengisi kebutuhan PJTBU dan PJSKBU.

Bapak-Ibu semua,

Izin saya melaporkan terkait dengan target pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi atau TKK yang akan dilakukan oleh Ditjen Bina Konstruksi pada tahun 2024 adalah sebanyak 45.190 orang. Pelatihan sertifikat ini akan dilaksanakan oleh 7 balai jasa konstruksi wilayah yang wilayahnya mencakup 34 provinsi di seluruh Indonesia yaitu di wilayah 1 di Aceh yang meng-cover wilayah Aceh, Sumut, Sumbar dan Kepulauan Riau dan Riau. Kemudian di wilayah 2 meng-cover Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi dan Lampung. Kemudian wilayah 3 ada di Jakarta meng-cover wilayah Banten, DKI dan Jabar. Wilayah 4 ada di Surabaya meng-cover Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Kemudian wilayah 5 ada di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin meng-cover Wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Kemudian wilayah 6 ada di Sulawesi Selatan meng-cover wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan serta wilayah 7 ada di Provinsi Papua di Jayapura untuk meng-cover wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Berikutnya adalah terkait dengan target pembinaan jasa kerja, pembinaan tenaga kerja konstruksi Tahun Anggaran 2024 ya untuk pelatihan

di level 1 sampai dengan 3 ya, kami akan melaksanakan sebanyak 5.500 orang dengan total kebutuhan Rp9,3 Miliar untuk memenuhi tenaga kerja terampil jenjang 1 sampai dengan 3.

Kemudian izin melaporkan terkait dengan isu pemberian uang harian bahwa terkait dengan pemberian uang harian kepada tenaga kerja konstruksi pada pelatihan saat mengikuti pelatihan, saat ini kami masih mengikuti standar biaya masukan Kementerian Keuangan berdasarkan PMK 83 Tahun 2022 yang diberikan melalui uang saku sebesar 85.000 sampai dengan 120.000 tergantung wilayahnya, di mana uang saku bersifat umum karena belum ada standar khusus untuk pelatihan tenaga kerja konstruksi.

Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh seluruh Anggota pada rapat dengar pendapat sebelumnya, kami sudah menyiapkan konsep surat kepada Kementerian Keuangan disertai dengan naskah akademis terkait dengan usulan Standar Biaya Masukan Lainnya atau SBML untuk pemberian uang harian kepada tenaga konstruksi terampil yang sedang mengikuti pelatihan dan atau uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh balai jasa konstruksi wilayah. Sambil menunggu SBML tersebut disetujui, saat ini sedang kami usulkan kepada Kementerian Keuangan, saat ini sudah terjadi perbaikan standar biaya masukan ya, di mana alokasi untuk pelatihan untuk uang saku dari semula 85.000 sampai dengan 120.000, sekarang sudah mencapai antara 110.000 sampai dengan 170.000 per hari, jadi relatif lebih baik daripada SBM sebelumnya.

Kemudian izinkan juga kami melaporkan terkait dengan rencana lelang dini, seleksi dini, tender dini di mana kami merencanakan tender dini akan dimulai untuk Tahun Anggaran 2024 di bulan Oktober 2023. Berdasarkan data *e-monitoring* terkait dengan progres seleksi dini Tahun Anggaran 2024 yang sudah teridentifikasi sebanyak 1.566 paket dengan jumlah paket terbanyak berada pada Ditjen Bina Marga, sebagian besar *delapan puluh empat (suara kurang jelas) sembilan persen* paket tender seleksi dini merupakan *single years contract*. Sementara untuk jumlah paket kontainer atau seleksi sebanyak 577 paket di mana pelaksanaannya akan dilakukan melalui *e-purchasing* atau *e-catalog*. Data ini kami ambil dari *e-monitoring* Kementerian PUPR per September, per 4 September 2023 dan masih akan terus bertambah baik dari sisi jumlah paket maupun jumlah DIPA atau pagu DIPA pengadaan.

Kemudian terkait dengan percepatan peningkatan kualitas jalan daerah, proses pemilihan akan dilaksanakan mayoritas dengan mekanisme *e-catalog*. Jadi total Rp15 triliun ada 1,5 triliun untuk MYC, ada 13,5 triliun untuk *single years contract* ya, tetapi jumlah paketnya sampai dengan saat ini belum dapat diidentifikasi karena menunggu surat keputusan bersama Menteri PUPR dengan Bappenas serta daftar penetapan paket yang ditetapkan antara Deputi Bappenas dan Ditjen Bina Marga, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu bahwa sebagian besar paket IJD dilaksanakan dengan mekanisme *e-catalog*.

Kemudian terkait dengan rekrutmen pengurus LPJK untuk 2025-2028 bahwa pada tanggal 21 Desember nanti pengurus periode 2021-2024 akan berakhir. Oleh karena itu, pada tahun 2024 akan direncanakan dilaksanakan rekrutmen pengurus LPJK untuk periode 2025 sampai dengan 2028, akan kami usulkan 14 calon pengurus untuk kemudian dipilih 7 pengurus LPJK oleh DPR RI. Rekrutmen ini akan dilakukan oleh panitia seleksi atau Pansel yang terdiri dari pengarah Pokja serta sekretariat. Sebagai informasi susunan Pokja Pansel LPJK 2021-2024 terdiri atas 6 unsur yang mewakili dari bidang konstruksi, bidang kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat, bidang hukum, bidang pengawasan, bidang sumber daya manusia dan akademisi. Proses seleksi administrasi direncanakan akan dimulai pada bulan Juni 2024 dan diharapkan bisa selesai di bulan November atau Desember tahun 2024.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan rencana kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2024 pada rapat dengar pendapat hari ini. Kami sangat mengharapkan masukan dan arahan dari Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat untuk meningkatkan kualitas Bina Jasa Konstruksi di masa yang akan datang.

Atas perhatian dan masukan serta arahan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dirjen, tepuk tangan juga Ibu, 2 wanita itu. Ibu Dirjen tepuk tangan, Pak Dirjen tidak tepuk tangan kan tidak, tidak, tidak adil namanya.

Waktu kita sekarang sudah jam empat, ya. Kalau bisa kita selesai magrib, ya kalau bisa kita selesai magrib, penanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 16 orang ya, iya, ya ada 16 yang tercatat di sini terlingkar. Jadi maksudku adalah kita tidak batasi apa ya, bermaksud membatasi tapi kalau bisa secepatnya saja bicaranya, kemudian kita hilangkan hormat menghormat supaya jangan terlalu lama ya, kita hilangkan hormat menghormat.

Pak Hamka B. Kady, Hamka B. Kady silakan.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B KADY, MS):

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi dilarang saling menghormati ini, Pak Ketua ya.

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati, masih juga tetap saya hormati,
Bu Dirjen, Pak Dirjen dan seluruh jajaran yang saya hormati,**

Saya tidak terlalu lama, melihat waktu.

Yang pertama Ibu Dirjen masukan, ini prioritas penganggaran, hanya agak kritis sedikit ini Bu Dirjen, harusnya itu posisi keempat usulan Anggota DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Pasal 80, Anggota DPR berhak untuk mengusulkan dan merubah ini ya, Bu, ya tolong, dianggap juga sedikit Anggota DPR, biar sedikit aja karena undang-undangnya juga ada. Kami tidak mengemis sebenarnya Bu Dirjen, tetapi ganjil rasanya seperti ini ya. Kalau tidak juga *ndak* apa-apa, paling distempel selesai kan gitu. Itu kritikan saya yang pertama, mohon mudah-mudahan, kalau ini yang diajukan kepada kami ya tidak usah, *ndak* usah dilibatkan DPR dong ya, Bu ya, mohon maaf ini kalau saya mengkritisi. Selama ini kami dengan kemitraan kita tidak pernah pasti direktif presiden, kunjungan kerja DPR dan usulan DPR, itu yang biasa yang terjadi, tapi ini tidak ada, kalau tidak ada ya sudah *ndak* apa-apa ya itu. Itu satu ya.

Yang kedua, saya hanya ingin memastikan bahwa apakah yang diprogramkan di sini terutama padat karya, sama dengan kesimpulan pada waktu Raker dengan Pak Menteri, bahwa jumlah alokasi padat karya, proyek padat karya itu sama dengan tahun lalu. Saya tidak bisa melihat satu persatu kalau itu pasti bisa sama dengan tahun lalu, ya selesai urusannya, Bu Dirjen. itu aja yang kami ingin pastikan, karena kami tentu tidak tahu di sini yang mana, yang mana, yang mana. Yang jelas apa yang disampaikan itu padat karya sejumlah itu, memang sejumlah itukah kalau memang seperti itu dan sesuai dengan kesimpulan dengan Raker, oke tidak ada masalah, karena kami juga tidak hafal berapa tahun lalu. Nanti kami buka-buka nanti jangan sampai terjadi perbedaan padahal kita sudah sepakat bahwa harus sama dengan tahun lalu. Itu yang kedua ya.

Yang terakhir, saya kira kalau tidak ada hal-hal lain barangkali Ibu Dirjen, saya kira tidak ada persoalan kita membahas lagi di sini, dua poin itu saja yang menjadi perhatian saya. Mudah-mudahan ada sedikit apa namanya empati juga kepada Anggota DPR yang duduk di sini ya, yang menandatangani dan menyetujui anggaran Ibu dan Bapak sekalian.

Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Pak Sumail, silakan Pak Sumail.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
Selamat sore.

Yang saya hormati semuanya,

Menyingkat waktu Ibu Dirjen, Pak Dirjen dan segenap para Kepala Balai seluruh Indonesia, Jawa Timur hadir *nggak* Jawa Timur ya? hadir ya, oh ya, dapat saya sampaikan Ibu bahwa selama ini koordinasi kami dengan Ka.Balai di Jawa Timur cukup bagus dan lancar walaupun ada beberapa catatan-catatan kaitannya, oh iya, saya tidak menghormati Ketua sama Anggota karena *include* tadi Pak Hamka, Ketua.

Kalau saya lihat, saya kembali ke tentang IBM dulu yang dipaparkan Ibu tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hamka tadi bahwa seyogyanya pagu anggaran dari kementerian dan direktorat-direktorat jenderal yang ada, kegiatannya mengacu kepada beberapa hal tadi yang disampaikan, karena kami ada amanat daripada Undang-Undang MD3 yang wajib hukumnya, wajib ini Bu untuk memperjuangkan pembangunan wilayah pemilihan.

Nah, tentu dengan kenaikan 4 triliun, ini satu angka yang sangat luar biasa, yang pertama kami harapkan bisa *men-trigger* atau bisa mendorong penyelesaian proyek strategis nasional yang menjadi Renstra sejak tahun 2020 ke pemerintahan Pak Jokowi ini.

Kedua kalinya, bahwa Ditjen Cipta Karya ini memang luar biasa Ibu kaitannya dengan kesehatan, kualitas hidup manusia kan, penyelesaian persoalan-persoalan kumuh, beberapa juga restorasi gedung-gedung yang bersejarah seperti itu. *Nah*, maka diharapkan nanti dengan anggaran, kenaikan anggaran yang cukup banyak mampu meningkatkan kualitas kerja, kualitas daripada kegiatan-kegiatan yang ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia. *Nah*, kaitan dengan kegiatan-kegiatan IBM barangkali kalau teman-teman yang lain sudah pada selesai itu, karena mungkin lambatnya respon bahkan apa lambatnya respon, bahkan tempo hari saya sempat komunikasi sama Ibu bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan dengan persyaratan-persyaratan yang terus berubah, contoh misalnya Sandes. Di Dapil saya, Ibu, tidak ada lagi yang desa tertinggal gitu, tempo hari juga masyarakat harus... desa tersebut *stunting*, begitu ada keterangan dari bupati, kabupaten tidak sesuai dengan provinsi ditolak lagi. *Nah*, mohon hal-hal yang sedemikian ini, karena tidak sama kondisinya di setiap, di setiap Dapil di mana teman-teman Anggota berada.

Oleh karena itu, mungkin disederhanakan, sehingga kemudian ini juga bukan soal marwah atau kehormatan dewan, kadang-kadang kita juga staf kami harus minta-minta juga kepala-kepala daerah itu untuk mendapatkan rekomendasi itu, seperti itu. *Nah*, sementara yang kita bahas di sini APBN menyangkut semua daerah ya jangan sampai nanti APBN juga ada apa namanya, rasa APBD, ini juga tidak baik untuk kami semuanya.

Yang kemudian kedua, seyogyanya juga ada IBM yang PISEW itu juga tidak dibatasi dalam satu kecamatan satu desa. Mungkin juga ada beberapa kegiatan sehingga mempercepat koneksitas antar daerah sebagai program infrastruktur yang apa berbasis masyarakat guna mengkoneksikan antar daerah yang barangkali tersendat selama ini.

Namun demikian, secara umum bahwa kegiatan-kegiatan ini sangat sangat baik dan berdampak, berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kami mengingatkan hasil, pendapat kami, hasil rapat kami dengan Pak Menteri kiranya bahwa IBM itu tetap dipertahankan, bila perlu itu bisa ditingkatkan.

Yang ketiga, Bu Dirjen, kami, saya sudah melakukan kunjungan-kunjungan di Dapil bersama staf Pak Ka.Balai, karena Pak Ka.Balai waktu itu naik haji kan, ada satu daerah kawasan apa namanya, religi, di situ banyak orang berkumpul tiap tahunnya bahkan puluhan ribu kan dan juga ada satu tempat namanya Kyai Soleh Lateng, di mana beliau juga dulu merupakan salah satu pendiri NU dan di tempat situlah dulu juga Ansor juga di apa, diberdirikan di (*suara kurang jelas*) itu. Tentu ini butuh sentuhan dari kita sebagai wujud penghormatan karena banyak orang-orang yang ber apa namanya, berwisata secara keagamaan di sana. Usulan secara konkretnya nanti akan saya sampaikan secara tertulis kepada Ibu Dirjen dan mudah-mudahan ini bisa diakomodir.

Yang kedua, terhadap Bapak Dirjen Bina Konstruksi, ada beberapa hal, Pak, catatan kami kaitannya dengan karena Ditjen Bina Konstruksi ini merupakan ujung tombak daripada kegiatan ke-PUPR-an, kaitannya dengan sertifikasi tenaga ahli, kegiatan lelang, juga kandungan TKDN apa, kandungan dalam negeri di dalam setiap kegiatan-kegiatan kementerian. *Nah*, tentu kaitannya dengan proses-proses dan apa namanya, kaitannya dengan lelang, Pak, mungkin di apa ya, dicarikan sebuah solusi agar memberikan kesempatan yang luas utamanya terhadap penyedia-penyedia jasa lokal karena hingga hari ini saya sering dapat banyak komplain kayak gitu loh. Pak, ini gimana kok kegiatan-kegiatan yang di bawah 10, di bawah 5 itu orang-orang dari luar Dapil saya, Pak. Sementara secara moral, secara politik kami juga bertanggung jawab tentu memberikan kesempatan kepada mereka dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Mohon ini diperhatikan Pak Dirjen dan terus disampaikan ke apa namanya balai-balai yang ada di masing-masing provinsi.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih. Izin menyerahkan usulan.

KETUA RAPAT:

Nah, sok silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bagi yang mau menyerahkan usulan sekaligus saja semuanya ayo, yang mau menyerahkan *anu* usulan, kalau bisa sekaligus saja semua, silakan yang mau menyerahkan usulan, silakan, Pak, supaya ada satu waktu jangan lagi berlama-lamaan. Di sebelah kanan tidak ada yang menyerahkan? ayo Bu Cen silakan. Sudah? itu yang dari Makassar itu, Pak.

Pak Syahrul Aidi, silakan, Pak.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.):

Ya, terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V,
Bu Dirjen,
Pak Dirjen, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama ke Binkon, ini evaluasi, Pak, agar ketika ada pekerjaan yang tidak selesai dan kontraktornya lari itu yang di-*blacklist* orangnya, jangan hanya perusahaannya karena terjadi saya pernah menemukan orang yang dulu bekerja, yang tidak selesai pekerjaannya, dia pakai perusahaan lain dan juga tidak selesai pekerjaannya. Jadi jangan hanya yang di-*blacklist* itu perusahaannya tetapi juga adalah orangnya karena kalau hanya perusahaannya dia bisa pakai perusahaan lain dan harus jelas. Jadi *person*-nya yang harus di-*blacklist*.

Yang kedua, mohon maaf ini, ini perlu saya sampaikan, BP2JK Kepala Balainya di Riau agak rasis, Pak. Kebetulan saya tidak tahu juga ada kontraktor yang tidak selesai pekerjaannya berasal dari Kampar, kebetulan itu daerah saya dan ada ungkapan pokoknya kasih jangan sampai kepada pengusaha Kampar. *Nah*, ini *nggak* boleh seperti ini *nih*, *nggak* boleh menyebutkan daerah, apakah karena satu orang Jawa tidak selesai pekerjaannya kemudian semua Jawa di-*blacklist*, maka saya katakan *blacklist* orangnya per orang, jangan bawa-bawa nama daerah begitu. Saya selaku orang Kampar tersinggung begitu, apalagi saya Anggota DPR RI di Komisi V, saya tidak pernah mendorong-dorong, mengarah-ngarahkan ya. Jadi kalau ini sempat diucapkan oleh Kepala Balai ini mohon dicabut ini, kami orang Kampar merasa tersinggung.

Yang kedua, di Cipta Karya luar biasa, Bu, program Ibu ini luar biasa dampaknya kepada masyarakat, khususnya yang bersifat apa namanya IBM/Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Sanitasi *Subhanallah* yang masyarakat yang selama ini buang air di, BAB itu di sungai sekarang sudah di WC Bu, pertama ucapan terima kasih. Yang kedua, saya ingin menyampaikan untuk kegiatan PISEW, Bu, saat ini itu kan disyaratkan bahwasanya IDM-nya itu tidak boleh maju atau mandiri, hanya bolehnya desa yang berkembang. Sementara faktanya saya melihat banyak desa-desa yang dipaksa oleh pihak tertentu *ndak* tahu saya apakah Kementerian Desa untuk naik kelas, padahal luar biasa kebutuhannya. Saya contoh ini Bu, ada Kuala Selat namanya, Desa Kuala Selat itu luar biasa butuh perhatian pembangunan, saya pernah masukkan di sana program PISEW, baru dibangun jalan, mobil *nggak* masuk, Bu, sepeda motor jalannya hanya untuk satu sepeda motor saja *nggak* bisa pas-pasan gitu, masih banyak butuh pembangunan jalan tetapi desanya itu saat sekarang itu sudah desa maju Bu, otomatis *nggak* bisa lagi ditambah, dibuat program PISEW. Jadi mohon dievaluasi lagi syarat desa yang bisa menerima program PISEW Ini adalah desa berkembang ke bawah. Kalau bisa lihat dengan faktanya selama itu yang kita usulkan itu memang kebutuhannya itu bisa ditampung. Apalagi kegiatannya ini namanya PISEW kan, program infrastruktur sosial ekonomi antar wilayah karena memang tidak tertampung oleh seluruh dana desa yang mereka miliki, ini yang kedua.

Yang ketiga *eh* yang kedua, penataan, saya lihat di sini ada penataan kawasan strategis, Bu. Saya pernah usulkan ini penataan kawasan Tepian Narosa di Kuantan Singingi, ini adalah daerah yang membuat pacu sampan, itu sudah seratusan tahun, Bu, belum Indonesia merdeka lagi dan kawasan ini sejarahnya luar biasa, bagaimana sampan itu dibuat, bagaimana tradisinya, adatnya, prosesnya itu luar biasa, ini zamannya Pak Ikhwanul waktu Ka. Balai pernah bahkan nyarankan ke saya waktu itu, dan ini saya coba berkolaborasi juga dengan SDA nantinya agar dibangun juga turap tebingnya karena tiap tahun. Bahkan kemarin setahun yang lalu itu Pak Sandiaga Uno datang ke sana dan berjanji akan menata kawasan itu, tentu karena ini bahagian dari Tupoksinya Cipta Karya, agar ini bisa ditata, Bu.

Kemudian, tentu kelanjutan program SPAM IKK *alhamdulillah* saya lihat tadi mudah-mudahan ini bisa berlanjut Pelalawan dan Tapung Hulu. Dan yang lain-lain saya lihat positif bagus, mudah-mudahan bisa dilanjutkan, kami tidak tentu melihat hanya memandang secara elektoral saja, Bu, ini ada anggapan, Pak, kan Bapak *nggak* butuh lagi pembangunannya, kan Bapak pemilihannya nanti Februari 2024, oh *nggak*, bagi saya *nggak*, bagi saya berkewajiban bukan hanya kepentingan untuk elektoral Februari 2024, tapi bagi saya karena periodenya sampai 1 Oktober 2024, saya akan tetap bekerja memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat yang saya wakili. Jadi mohon jangan pendekatannya, pendekatan sekedar untuk mendapatkan suara di Februari 2024, tapi ingin melayani, ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Ibu Cen Sui Lan.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan, teman-teman Komisi V,
Bu Dirjen, Pak Dirjen dan semua jajaran,**

Langsung saya ke Bu Dirjen.

Bu Dirjen, terima kasih tadi sudah ada zoom mengenai teknis pelaksanaan krematorium, sudah ada gambarnya yang semula empat lantai mohon dibantu supaya menjadi lima lantai karena ada salah perhitungan letak bangunan. Jadi nanti mungkin bisa dibantu Bu Dirjen.

Yang kedua, pasar juga bagus, makanya saya terima kasih Bu Dirjen sudah banyak membantu saya. Tim dari Balai juga luar biasa menemani saya ke madrasah, ke sekolah-sekolah di Kepri. Bu Dirjen, target prioritas sektor prasarana pendidikan untuk 2024 memang harus menjadi prioritas karena banyak sekali sarana pendidikan yang perlu bantuan, apalagi di Kepri, di Kepri itu kami di ujung pulau, di Anambas, di Lingga dan di sekitar itu sangat perlu banyak sekolah-sekolah yang sudah rusak, juga ada yang hanya pakai kayu, Bu. Jadi Bu Dirjen, sudah rusak, udah tidak lantai pun sudah tidak ada, mohon perhatian, juga madrasah-madrasah. Jadi kalau saya melihat ada prioritas Ibu membangun di Arab Saudi dan di Malaysia, Bu, miris sekali, tolong diperhatikan kami-kami di pulau-pulau terluar.

Yang kedua, mengenai pembangunan gedung. Saya melihat pemaparan ada pembangunan gedung untuk IKN berapa puluh, berapa puluh, saya mintakan di Batam dua gedung, Ibu. Kemarin saya sampaikan ke Pak menteri, bisik-bisik dengan Pak Menteri, Pak Menteri sudah setuju. Tolong diakomodir Bu, 2024 dua gedung, satu untuk komunitas Keuskupan Katolik, satu untuk Kristen Protestan. Jadi mungkin bisa dibantu Ibu untuk supaya pemerataan kepada seluruh ya, Bu, ya. Jadi Bu Dirjen itu saja yang saya mintakan.

Ke Pak Dirjen, Pak Dirjen Bikon, kan banyak pelatihan tukang Bapak. Jadi saya ingin mengajukan juga bagaimana kalau pelatihan tukang, jangan hanya tukang, tapi welder, karena di Kepri itu banyak galangan kapal, kekurangan tenaga kerja welder. Jadi kalau bisa diadakan itu sangat membantu untuk peningkatan perekonomian kita juga. Jadi mohon menjadi perhatian ya Pak Dirjen ya.

Mungkin itu saja dari saya.

Terima kasih, Pimpinan, terima kasih semua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ibu Sadarestuwati.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Mitra Komisi V, para Dirjen beserta seluruh jajarannya,**

Saya langsung saja melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh sahabat saya, sebelah saya yang sebentar lagi akan bersama-sama saya, benar *nggak sih?* karena kelihatannya hari ini *nggak, nggak* ikut jadi kelihatannya mau ikut saya. Ya, Bu Dirjen, memang ini menjadi satu permasalahan yang serius ketika program-program dari kementerian, program-program kerakyatan yang langsung ke desa itu selalu diminta desanya desa yang masih tertinggal atau berkembang. Sementara sekarang, kepala daerah hampir semuanya menginginkan, semuanya menjadi desa mandiri, bahkan saya kemarin baru minggu yang lalu saya langsung ngecek untuk dua minggu yang lalu, ngecek untuk program sanitasi di Desa Tejo. Ini juga, saya, saya lihat saya juga prihatin, desa di di apa nama satu jalur dengan jalan raya yang artinya ini kan sudah masuk perkotaan lah, karena berdekatan dengan Mojoagung, bersebelahan lah, 50% lebih penduduknya itu tidak mempunyai, iya kamar mandi WC, akan tetapi begitu saya ke sana, Kadesnya bilang, saya kaget, Kadesnya bilang Bu, ini desa ini sudah dimasukkan desa ODF. Saya bilang berarti tahun depan desa ini sudah *nggak* bisa lagi *loh* untuk mendapatkan program sanitasi, lah Bu tapi masih ini banyak sekali yang *nggak* punya. Akhirnya saya bilang di mana kalau kalau BAB, di mana kalau mandi, pada waktu itu sungai di depannya persis, di depannya perkampungan itu, itu sungai kecil dan airnya sangat kecil karena musim kemarau.

Saya tanyakan, terus mandinya gimana? ya di sini, terus BAB-nya di mana kalau kering begini? kita buat lubang, Bu, buat apa *jumblengan* di kebun, prihatin Bu, tetapi des, kepala daerah memaksakan kehendak desa-desa ini menjadi Desa ODF. Belum lagi, belum lagi desa-desa yang dikatakan sudah maju, mandiri, mandiri dari mana? maksud saya pemerintah daerah pun harusnya tidak dipaksakan untuk hanya sekedar mendapatkan penghargaan sebagai desa mandirilah, desa yang bebas ODF lah yang akhirnya menghambat pembangunan di desa itu sendiri.

Bahkan mungkin kalau ada yang pernah melihat IG saya, saya Bu, saya, saya sakit, kondisi sakit ini, saya yang semestinya operasi itu tanggal 5 Agustus, *sorry*, 15 Agustus, saya paksakan ke daerah dan ini dusun yang tidak ada jalannya ke sana, Bu, karena di hutan, jadi mereka di pinggiran hutan, masih Kabupaten Jombang, Bu. Kalau dari Jombang ke Ploso ini setengah jam, 30 menit, dari Ploso ke Rapah Ombo ini masih 2 jam setengah, 2 jam setengah, dan di sana *nyuwun sewu*, tidak ada Puskesmas, tidak ada yang namanya apa namanya, apa *sih* kalau bukan Puskesmas kecilnya lagi itu apa Pustu, Pustu saja tidak ada ya, sekolah apalagi mereka tidak ada dan sekolahnya itu mereka harus jalan kaki 6 kilometer ke arah Bojonegoro, jalan kaki karena memang tidak mungkin untuk naik kendaraan atau ke Nganjuk.

Jadi ini benar-benar, Bu, saya prihatin sekali. Saya sampaikan kepada mereka masyarakat di situ, saya pastikan saya akan paling tidak membenahi jalan ini, memadatkan atau apalah yang pasti bisa untuk dilewati kendaraan. Apalagi Ibu, kalau hujan mereka sudah terisolasi tidak bisa ke mana-mana, hasil bumi mereka tidak pernah menjual hasil buminya, mereka hanya saling apa namanya, barter, untuk dimakan sendiri.

Saya di sana dikasih makanan daun apa itu namanya, daun-daunan yang ada di hutan itu. Jadi benar-benar daging pun mereka pakai ini dulu mencari ke hutan apa namanya menembak kijang itu, itu yang mereka makan, itu pun sesekali kalau ada tamu dan kepala daerah itu selama ada kepala daerah di Jombang baru satu kepala daerah yang datang, satu wakil bupati dan DPR RI, DPRD, DPR provinsi baru saya yang datang, karena memang tidak, tidak, apa mungkin mereka juga tidak menginginkan untuk datang karena terpencil sekali, tetapi secara kemanusiaan ini saya tidak boleh membiarkan maka saya minta tolong mungkin ada program yang bisa dimasukkan untuk di sana, Bu. Kalau membangun jalan jelas tidak mungkin untuk membangun karena kalau tidak ada izin Perhutani jelas sulit, tetapi kalau di mungkin hanya di beko, diratakan, dipadatkan, saya kira itu sesuatu yang sudah, sudah sangat amat membantu masyarakat, itu yang pertama.

Jadi intinya adalah desa tolong juga di, tidak dipaksakan untuk berstatus desa mandiri ataupun desa maju kalau memang pada kenyataannya tidak memungkinkan.

Berikutnya Ibu, untuk PISEW. PISEW ini kalau mengikuti kesimpulan pada rapat yang lalu, itu per Anggota, itu kalau *nggak* salah dapatnya kemarin 20 ya? *Nah*, akan tetapi di sini hanya 738 lokasi, ya mungkin *nggak* tahu ini dapatnya berapa, 12 pun belum tentu ya, tentunya kami berharap ini tidak berubah, Ibu, apalagi saat ini kami sangat membutuhkan program-program kerakyatan ini, begitu dengan Sanimas dan yang lainnya, kami tentunya sangat, berterima kasih dengan program-program kerakyatan yang ada di Dirjen, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dan terakhir saya mengingatkan kembali, mohon dengan sangat untuk masjid dan saya mungkin diizinkan untuk bisa mengusulkan untuk rehab sekolah yang negeri tentunya. Saya mohon seperti saya katakan tadi bahwa

di Jombang pun masih sangat amat banyak desa-desa atau sekolah-sekolah yang terpencil yang tidak tertangani dengan baik, begitu juga dengan Nganjuk, karena memang daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah perbatasan, ini memang seringkali terabaikan.

Untuk Bina Konstruksi. Bina Konstruksi tentunya kami, saya juga apa, menyampaikan apa ya, apa ya, ya penilaian yang cukup baguslah, kemajuan yang sangat luar biasa, ketika saya melihat bahwa di sini pengadaan pun menggunakan *e-katalog*. Yang ingin saya tanyakan, seberapa jauh sudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini dengan menggunakan *e-katalog* ini.

Kemudian Bapak, berulang kali saya sampaikan bahwasanya akibat dari lelang yang seperti sekarang ini ya, yang mana BP2JK sendiri tidak berani mengambil keputusan bahwa pemenang lelang tidaklah harus apa, penyedia jasa dengan penawaran terendah, dengan alasan aturannya yang tidak memungkinkan, tetapi perlu diingat dengan keadaan seperti sekarang ini banyak sekali penyedia jasa konstruksi yang mereka menawar dengan sangat rendah hanya sekedar menurut saya, sekedar gaya-gayaan aja bahwa dialah yang menang, sama seperti tadi yang dikatakan oleh teman saya setelah itu tidak diselesaikan, ditinggal. Ini adalah akibat dari proses lelang yang seperti sekarang ini, tentunya kita berkewajiban untuk memperbaiki, caranya apa? kalau dikatakan tidak ada aturan yang mendukung, ya dirubah aturannya, karena apa? anggaran dikucurkan untuk bisa memberikan kualitas yang terbaik bagi rakyat, untuk bisa memberikan kualitas yang terbaik, bukan sekedar membangun tiga bulan kemudian malah hancur dan ini sering sekali terjadi, yang tentunya Kementerian PUPR adalah kementerian teknis yang sudah diakui pengalamannya ya, di dalam membangun apapun itu, infrastruktur baik jalan, bangunan gedung atau mungkin apa atau juga apa untuk sumber daya air ya, akan tetapi kalau, kalau kemudian masih tetap seperti ini prosesnya, saya kira itu tidak bisa untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat dan pada akhirnya APBN yang diberikan ini akan sia-sia. Ini yang sering diprotes oleh masyarakat, apalagi sekarang masyarakat kita sudah sangat apa namanya, kritis ya. Tentunya kami di Komisi V akan mendukung perubahan-perubahan yang akan dilakukan yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa ini agar mendapatkan kualitas yang lebih baik dan tidak terjadi lagi para kontraktor menghilang begitu saja ya, itu Bu Dirjen dan Pak Dirjen.

Terima kasih banyak, mohon maaf saya ngomong agak panjang karena bagi saya ini mumpung belum *kadung*, belum terlanjur selamanya, seterusnya, saya kira ini yang perlu diperbaiki.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Terima kasih.

Pak Muhamad Aras.

F-PPP (Dr. H. MUH ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pak Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Bu Dirjen, Pak Dirjen dan serta seluruh jajaran, wabil
khusus para Kepala Balai di dari seluruh Indonesia,**

Pertama-tama, tentu ucapan terima kasih pada Bu Dirjen yang tentu aspirasi yang teralisasi di tahun-tahun kemarin luar biasa tanggapan masyarakat menyampaikan terima kasih juga dari masyarakat kepada Kementerian PUPR yang tentu banyak memberikan kontribusi dalam hal penanganan infrastruktur di daerah, terutama teman-teman yang berada di pedesaan melalui Sanimas, mereka sangat berterima kasih karena ada layanan dari PUPR yang betul-betul menyentuh kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak di masyarakat.

Yang kedua, harapan kami bahwa padat karya untuk 2024 ya tidak kurang dari jumlah tahun 2023 yang disepakati kemarin di rapat kerja bersama dengan Pak Menteri, olehnya itu ada beberapa yang barangkali perlu direvisi Bu Dirjen supaya bisa menyesuaikan.

Yang selanjutnya adalah saya pernah mengusulkan dua tahun yang lalu, melanjutkan pembangunan gedung UNM Makassar ada tiga unit, ada di Pettarani, ada di Pare-Pare dan ada di kampus dua di Parang Tambung Makassar, ini sampai sekarang belum satu pun yang terealisasi. Mohon perhatian agar ini bisa terealisasi paling minimal tahun 2024.

Yang selanjutnya adalah terkait dengan IKN. Ini bagaimana progres IKN sampai hari ini yang katanya akan ditempati untuk upacara 17 Agustus 2024. Ya, kita berharap bahwa apa yang menjadi target Presiden betul-betul bisa dicapai dan tentu ini menjadi dasar atau paling minimal keyakinan masyarakat atau investor bisa lebih maksimal sehingga siapapun Presiden yang akan datang itu bisa melanjutkan program ini sehingga betul-betul Indonesia bisa menghadirkan Ibu Kota yang betul-betul *smart* dan tentu ramah lingkungan ya,

kita harapkan Bu Dirjen bisa memberikan karya-karyanya yang bisa dinikmati anak cucu kita di masa akan datang. Barangkali cuman itu untuk Bu Dirjen.

Yang kedua, Pak Dirjan Binkon. Ini kita harapkan bahwa perbaikan-perbaikan sistem yang dipergunakan oleh teman-teman betul-betul selalu menyesuaikan dengan kondisi lapangan, di mana kejadian-kejadian kemarin sangat memberikan pelajaran buat kita bahwa dengan seleksi-seleksi yang dilakukan banyak mengakibatkan pekerjaan tidak tuntas ya, bahkan di Sulawesi Selatan diistilahkan bahwa banyak kontraktor pelari maraton, Pak ya. Baru mulai bekerja baru mencairkan 30% sudah bersiap-siap lari maraton sehingga pekerjaannya pasti akan terbengkalai ya, dan itu banyak yang terjadi ya, bahkan sampai hari ini masih banyak yang belum terselesaikan. Bahkan jembatan gantung yang dilelang pada tahun 2021 kemarin, salah satu di Sulawesi Selatan sampai sekarang itu kontraktor yang menyelesaikan akhir pekerjaan itu belum terbayarkan semuanya, ya bahkan penyedia material di lapangan juga masih diutang oleh para kontraktornya sehingga ini juga akibat-akibat yang memang penawarannya terlalu rendah, realisasinya juga sangat kualitasnya juga sangat tidak maksimal sehingga kita harapkan bahwa perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Bina Konstruksi bisa melahirkan pekerjaan yang berkualitas, tepat waktu dan paling tidak juga tidak menimbulkan masalah di masa-masa yang akan datang.

Barangkali cuma itu, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Pak Eddy Santana, silakan Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi V beserta Anggota yang saya hormati,
Pak Dirjen Bina Konstruksi,
Dirjen Cipta Karya jajaran beserta seluruh jajaran yang sama saya hormati,
Para Kepala Balai, salah satunya ada yang dari Sumatera Selatan ya, di atas Pak Kusuma ya, BP2JK ada ya, ada juga ya? oke oh ini,**

Ya, langsung saja, Pak. Jadi untuk, ini di Dirjen Bina konstruksi, Pak, kayak gini. Kita sering sudah mengadakan pelatihan-pelatihan gitu, pelatihan

tukang khususnya, tukang batu, tukang kayu, baja ringan ya dan lain sebagainya, mungkin beton juga. *Nah*, tapi ada keluhan, Pak, dari teman-teman yang sudah mengikuti, mereka sudah dapat sertifikat karena ini proses sertifikasinya. Pekerjaan di Sumatera Selatan itu banyak, di jalan tol itu *nggak* habis-habis sekarang, Pak, ada terus gitu ya, gedung-gedung juga seperti itu ya. Jadi yang memakai tentu Unor lain ya di Bina Marga, di Cipta Karya, di perumahan pemukiman gitu, di SDA. Hanya keluhan mereka ini, Pak, kami sudah dapat sertifikat tapi susah sekali cari pekerjaannya, kami kalah bersaing dengan teman-teman ya mohon maaf dari Jawa, saya sampaikan. *Nah*, inilah mungkin kalian kurang disiplin dibandingkan tenaga kerja dari Jawa. Kalau masuk jam 08.00 ya harusnya jam 08.00 tapi kebanyakan dulu, Pak, jam 08.00, jam 10.00 sudah stop gitu ya ngopi dulu, ngerokok sejam kerja lagi gitu, kalau tidak ada pengawasan yang ketat. Beda dengan teman-teman di Jawa, di Jawa Barat juga, saya ada pekerjaan di Jawa Barat ditinggal *nggak* apa-apa Pak, dari jam 08.00 betul-betul mereka kerja jam 08.00 sampai jam 12.00, jam 12.00 *nggak* boleh diganggu lagi Ishoma gitu, *nggak* mau dia disuruh, 1 jam istirahat, tapi setelah itu semua kerjaan dia kerjakan tuntas.

Nah, inilah mungkin ada baiknya kurikulum atau apa ya ininya, silabus dimasukkan juga disiplin, Pak, masalah disiplin, saya tekankan disitu karena kalau tidak disiplin *nggak* dipakai gitu. Ini jadi mohon ini jadi perhatian dan juga mereka menginginkan justru saya mau dibawa jadi pembina asosiasi dari mereka untuk audiensi ke teman-teman di Unor lain, Bina Marga, di Cipta Karya dan ini memang saya akan lakukan gitu, jadi supaya mereka betul-betul bisa, bisa dimanfaatkan tenaga kerja lokal gitu ya. Sekarang sama saya kira, kualifikasi mereka setelah dapat sertifikat itu sama dengan teman-teman dari Jawa ya, jadi *nggak* ada bedanya, jangan sampai mereka juga jadi penonton untuk ke teman lain bisa bekerja tapi mereka yang sudah mendapat sertifikat jadi penonton.

Nah, kemudian yang kedua, kita ada modernisasi di sini, presentasinya pengadaan barang dan jasa gitu ya. Modernisasi ini kalau saya lebih pas gitu reformasi pengadaan barang dan jasa. *Nah*, selama ini kami melihat kita tidak baik-baik saja, Pak, kalau tadi disampaikan juga teman-teman kalau menawar harga rendah sekali gitu, masih dikasih, tidak ada verifikasi, tidak ada izin *nggak* ada lagi sekarang ya. Mestinya kan lihat dulu lapangan gimana, masa orang nawar dari luar kota jauh-jauh tapi tidak melihat lapangan, mau gali saluran yang besar dikira saluran kecil, Pak, misalnya Karang Agung Ilir di tempat kami itu Banyuasin itu 100 meter saluran itu, 50 meter itu karena itu untuk pengairan daerah pasang surut ya, ya besar-besar, ya minimal 30-an meter lah.

Nah, ini tidak didukung dengan peralatan yang yang lengkap tapi di verifikasi umum administrasi lolos semua itu, ada semua peralatan, padahal mereka tidak memiliki. *Nah*, ini mohon ini hal ini kan berulang kali kita sampaikan, ada reformasi bidang inilah. Jadi kalau *nggak* punya alat kenapa harus dikasih, *nah* dia apa boleh kerja sama, ya boleh saja tapi kalau pekerjaannya besar *nggak* bisa, Pak, kalau kecil ya 10 miliaran masih bisa, kalau di atas 50 miliar tidak punya peralatan, baru mau minjam-minjam gitu, *nggak* mungkin dia mobilisasi peralatan dari, dari satu pulau ke pulau lain gitu

kan dalam waktu singkat, cepat, sementara pekerjaan harus dilaksanakan secara cepat waktunya, dan juga pemilihan itu tadi, tadi sampaikan, tidak harus terendah, okelah itu ada mungkin diatur, tapi jangan juga semau kita memilih gitu, oh ini, ada kejadian tolong dicek itu di Karang Agung Ilir nomor berapa? jauh nomornya 11 atau 12 dapat, sama nomor 11 sama 12 itu titik komanya sama, PT-nya lain, artinya punya orang satu tapi ya itu, malah yang dimenangkan itu gitu, saya lupa nomornya tapi seperti itu ya, jauh, tawarannya jauh di nomor berapa gitu, tapi itu yang, yang, yang terjadi. Kalau saya ya langsung coret sama begitu, kenapa, atau boleh gitu aturannya, ya mungkin boleh saja masukkan beberapa perusahaan, tetapi lihat, kalau titik koma yang sama ya aneh juga gitu, penawaran seperti itu dan dimenangkan.

Nah, kemudian mungkin, tadi teman-teman nyampaikan juga, jalan keluar solusi yang paling baik ke depan adalah *e-katalog*. Kami melihat di Inpres Jalan Nomor 3, itu sudah lebih baik, tidak ada lagi yang 30% nawar, *ndak* ada lagi 20, paling-paling belasanan per 11, 12 itu sudah jauh, *nggak* bisa mereka. Kalau misalnya harga beton satu juta setengah, *nggak* mungkin ada yang nawar 500 ya kan, katakanlah ini kan, kalau itu kan dibuka *online* seperti toko gitu, oh yang ini jual satu juta setengah, ada yang jual beton satu juta empat ratus lima puluh, dekat-dekat gitu, *nggak* mungkin dia 500.000 gitu. *Nah*, inilah yang saya, saya rasa ke depan ini kita harus harus jujur mengatakan *e-katalog* lebih baik dari tender yang biasa kita lakukan sekarang ini.

Nah, kemudian untuk Cipta Karya, Bu, sama saya kira ya dengan teman-teman, ya kita kan sudah sepakati itu di rapat pertama, bahwa, bahwa apa program IBM atau padat karya itu setidaknya-tidaknya jumlahnya sama dengan tahun lalu, *nggak* ada kaitannya dengan Pileg ya, Pilpres dan sebagainya, tapi itu ya, ya kami *kok* jauh gitu 2024, menurun jauh, *nah* ada apa gitu, padahal anggaran tidak, total anggaran tidak begitu jauh sama 150 triliun, 160 triliun itu di PUPR.

Nah, saya mengusulkan untuk *timeline*, pengusulan program IBM padat karya itu pengajuan usul sampai dengan SK Menteri itu ditarik setengah bulan lebih maju. Jadi gini, pengajuan usul 1 September sampai 31 Oktober, verifikasi 15 September sampai 7 November, kemudian verifikasi usulan tahap 1 di Oktober sampai pertengahan November, itu bisa dilakukan saya kira. Tahap kedua dari 1 sampai 31 November, SK Menteri itu sudah di tanggal 7 atau sampai tanggal 15 lah itu Desember, saya kira tanggal 7 itu selesai SK Menteri PUPR tentang Lokasi Kegiatan IBM Padat Karya. Jadi ini pelaksanaannya silakan untuk di Januari, Februari, Maret silakan, tapi semua sudah selesai di bulan-bulan Desember, atau akhir November.

Terima kasih, saya kira ini Pimpinan yang saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan, *bilahitaufik walhidayah*.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Pak Sudjadi, senior kita, silakan, Pak.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Terima kasih, Pimpinan.

Ibu Dirjen Cipta Karya, Bapak Dirjen Konstruksi yang amat saya banggakan,

Saya tidak tanya, Bu, karena program *panjenengan* di daerah saya itu super hebat, saking super hebatnya Kepala Balai langsung jadi direktur, *loh*. Saya kasih bukti, yang dikunjungi Bu Direktur pada waktu pertama kali di apa, Telomoyo itu, sekarang pendapatannya per bulan 300, kalau saya bohong potong jari. Kemudian banyak daerah-daerah lain yang pekarangan itu di atas ini bisa melihat 8 gunung itu sudah 40 juta per bulan. Kemudian di gunung apa, Gunung Andong, sebelahnya itu untuk *camping* hampir 14 juta dan lain sebagainya, belum makan, makam di Purworejo itu hanya menarik apa itu sewa apa parkir itu sudah 40 juta. Kalau saya bohong tanya Ka.Balai-nya, terutama direktur yang sekarang jadi direktur tanya, apakah saya menipu atau tidak.

Oleh karena itu, saya di sini hanya saran saja, Ibu *nggak* usah mencatat, *anu*, staf *nggak* usah mencatat, tapi saya jamin saran saya pasti hebat. Sektor air minum itu ada pemahaman SPAMDes, lalu SPAM berbasis masyarakat. Ibu, saya laporkan bahwa air suci jumprit Temanggung ditangani secara kolaborasi, satu-satunya program Cipta Karya yang bukan KSPN berkolaborasi, pemipaan sampai pembuatan *water tank* itu oleh SDA, jalan masuk dari jalan besar ke proyek itu oleh Bina Marga, peningkatan pariwisata alam dan sambungan air ke rumah-rumah itu Cipta Karya. Hebatnya bahwa kapasitas itu sebetulnya 50 liter/detik, tapi saya, Pak Direktur air minum hebat saya tahun ini baru dibantu 5 desa, per desa 200 SR. Jadi nanti kalau Desember atau itu diresmikan, orang 1.000 saya kumpulkan Ibu Dirjen hadir penerima itu, saya bersumpah *nggak* nipu-nipu, bisa tanya Ka.Balai, bisa tanya PPK, *nggak* saya, *nggak* nipu-nipu.

Terus kemudian 1.000 penerima SR akan gegap gempita, menyampaikan rasa syukur ke Ibu, mari kita ciptakan kebanggaan untuk rakyat, sekarang sanitasi, sanitasi ada hanyalah saran aja. Sekarang masalah sampah itu jadi masalah nasional. Mohon satuan anggaran TPS air itu ditingkatkan, kemudian standar-standar teknisnya itu lebih meningkat sehingga masalah pembuangan dan lain-lain itu bisa lebih disempurnakan. *Nah*, ini kalau ini saran, Bu, Cipta Karya itu ada dua tugas: satu, penugasan dari Presiden namanya KSPN, tugas pokok Cipta Karya itu pembantuan. *Nah*, kalau pembantuan ini bisa ditangani langsung Cipta Karya sendiri sampai PPK, tapi kalau KSPN tidak mungkin Ibu meninggalkan *stakeholder-stakeholder*

yang lain sehingga saya mohon dengan sangat Pak ke direktur yang menangani itu jangan lupa menggunakan *master plan* dengan konsultan yang terpercaya.

Yang kedua, jangan sampai kalau KSPN itu balai ditinggal, hanya di jak... telepon dari Jakarta (*suara kurang jelas*) rapat, itu terjadi di di *anu* apa, di Wonosobo dulu, mungkin kini sudah diperbaiki, *ntar* Bu, ini saya harus membaca ini. Jadi KSPN dan dukungan program ke daerah, KSPN itu Keppres, semua *stakeholder* bertanggung jawab dan terlibat antara K/L plus Pemda yang bersangkutan, agar pemangku kepentingan terlibat dan bertanggung jawab sehingga diperlukan *masterplan* yang disetujui antar pemangku kepentingan, sehingga proyek selesai, semua pemangku kepentingan tidak bisa lari dari tanggung jawab. Contohnya Borobudur, Bu, yang tiga pintu masuk itu masih *idle*, walaupun (*suara kurang jelas*) tapi faktanya *idle*, itu bukan karena kesalahan apa-apa, karena dulu tidak ada ikatan dengan pemerintah daerah, *who doing what*, tuh.

Yang kedua, bantuan KSPN itu kan besar-besar, apakah dalam program bantuan pasar dan lapangan tadi kita-kita Anggota ini bisa diberi bantuan entah itu 1,5 miliar atau 2 miliar, atau 1 miliar untuk lapangan tingkat kecamatan tapi milik desa, kenapa tidak bisa? air minum desa aja bisa *kok*, jalan desa aja bisa. *Nah*, ini, memang bedanya kalau yang besar-besar itu Instruksi Presiden, ini harapan Anggota Dewan, Bu. Sudah, sudah hampir selesai ini, sudah hampir.

Saya kira itu saja, Bu. Jadi nanti Desember, Pak Ka.Balai mana? datang *ndak*, Pak Direktur kita yang hebat, *nah* tolong Ibu Desember diajak, kalau tidak terbukti 1.000 orang bisa hadir potong jari.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Fadholi, silakan Pak.

F-P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M. Ikom):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati, Ibu Diana Kusumastuti, Diana itu ada lagunya itu, Diana, Diana bagus sekali itu, Dirjen Cipta Karya yang saya hormati, Bapak Rahman Arif, Dirjen Bina Konstruksi yang saya hormati, dan Seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini,

Saya bersyukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dirjen juga Pak Dirjen, terutama pada Ibu Diana, saya tidak bisa membayangkan begitu banyak pahala yang akan diterima oleh Bu Diana ini, karena sudah banyak membantu di pesantren, di masyarakat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh, *aamin allahuma aamin*. Terima kasih

Bu. *Nah*, biasa kalau sudah menyampaikan itu kan mesti ada usulan itu kan biasa, ini kan. Jadi kalau kepada Allah itu kan harus memuji dulu kemudian baru meminta kan itu, minta ampunan, *nah* ini adabnya semacam itu.

Tentu saya iri dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Djadi kan itu. Jadi kalau di sana sudah hebat, di tempatku juga lumayan hebat, tetapi kepingin kayak Mbah Djadi itu gimana caranya kan itu aja, jadi itu. *Nah*, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, banyak sekali pesan, Sanimas itu kan sementara ini kan hanya untuk kepentingan masyarakat, tetapi ada beberapa pesantren itu yang perlu air bersih, Bu, *nah* baik itu dari pengeboran maupun juga dari perpipaian, yang muridnya sudah ribuan itu. Saya pikir kalau itu dicarikan cantolannya, ini akan menambah, kalau pahala itu lebih banyak kan *ndak* apa-apa, Bu, kan termasuk uang itu kan semakin banyak kan semakin bagus *ndak* apa-apa kan itu. Jadi ini Sanimas untuk pesantren, selama ini kan Sanimas untuk masyarakat itu, Sanimas untuk masyarakat di tempat saya juga sudah sangat bermanfaat dan dikelola oleh masyarakat menjadi kesibukan masyarakat yang ada nilai ekonominya, tentu saya sampaikan terima kasih. Jadi poinnya saya adalah menyampaikan tolong kalau bisa itu Sanimas apa untuk pesantren yang memang betul-betul membutuhkan. Kalau kemarin kan sanitasi pesantren sudah tetapi sekarang masuklah Sanimas gitu *loh*, pengadaan air bersih untuk mencukupi pesantren di wilayah itu, ada mungkin yang sekedar dibantu perpipaannya, ada yang itu, *nah* ini mungkin bagus gitu *loh*.

Kemudian yang kedua juga, saya kemarin ketika Pak Menteri juga sampaikan sani apa, sanitasi yang bukan hanya pesantren tapi lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan yang memang memerlukan dan belum punya. Bayangin kalau kemudian salah satu sekolah itu wah sanitasinya juga tidak memenuhi syarat, ini kan juga sayang, karena mereka juga butuh untuk keperluan itu, apalagi yang itu intensitasnya itu sangat tinggi sekali. Itu kalau diperkenankan ya, ini bagaimana itu juga menjadi bagian yang perhatian dari Ibu. Kemudian juga kalau yang lain saya kemarin di luar program itu juga sudah menyampaikan usulan di tahun 2023 itu tapi belum ada yang nyantol, tapi saya *ndak* apa-apa, saya berdoa mudah-mudahan di tahun 2024 itu ada satu apa dua aja dari sekian usulan itu nyantol, kayak usulan sekolah ada. Aku tidak, *ndak* marah kok, *ndak* juga *nggak*, *nggak* ini sama Ibu, aku tetap mendoakan aja mudah-mudahan ini dari usulan saya itu ada yang nyantol *nggak* apa-apa kan itu, sekalipun itu. Ya, itu, Bu, jadi yang saya sampaikan terima kasih, mewakili masyarakat juga menyampaikan terima kasih, program Ibu sangat bagus dan itu kalau perlu diperbanyak lagi kan itu, bukan persoalan tahun politik tetapi persoalan kemaslahatan umat itu aja.

Pak Rahman Arief, jadi karena ini saya banyak melihat beberapa hal ya banyak itu apa orang-orang yang mengerjakan itu agak terlambat, *nah* semacam itu Pak ya, bahkan ini yang terus khususnya itu yang pernah saya lihat, tapi saya tidak pernah datang juga saya *ndak* tahu siapa. Cuman karena kalau ada program kegiatan dari PUPR kemudian dikerjakannya itu kayak misalkan jembatan gantung, itu kan ini yang ngerjakan kadang-kadang lambat, lama, jadi ada beberapa itu. *Nah*, bagaimana evaluasi terhadap perusahaan-

perusahaan yang memang menurut hasil evaluasi itu tidak baguslah itu. Saya pikir Bapak harus berani mengambil keputusan ketika perusahaan-perusahaan yang diberikan mandat untuk bisa melaksanakan kegiatan itu tetapi hasilnya tidak bagus. Selain tidak bagus itu waktunya telat, mungkin apa namanya kualitasnya tidak baku dan sebagainya, itu harusnya apa sanksi yang akan disampaikan itu, saya tanya aja. *Nah*, ini jangan sampai kemudian kemarin sudah dikasih pekerjaan, besok kemudian ada pekerjaan lagi dikasih tetapi masih molor lagi, masih ini, kan ini membuat citra dari PUPR ini jadi kurang bagus.

Saya pikir saya hanya mau menanyakan evaluasi Bapak terhadap perusahaan-perusahaan yang telah diberikan amanah dan diberikan kesempatan, tetapi tidak bisa melaksanakan dengan baik, itu apa langkah yang mau diambil itu. Jadi saya tidak tahu sebabnya apa, saya tidak masuk di wilayah itu, jadi apa sebab persoalan apa namanya *tuh, ndlosor-ndlosoran* lelang apa kan saya tidak tahu, karena tidak pernah masuk di wilayah itu, tetapi kita hanya melihat kalau ada perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan komitmen dan kemudian perjanjian yang tepat dan kualitas yang bagus, ya sanksi apa yang akan diberikan di situ.

Saya pikir itu yang saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Anggota sudah ya? sekarang yang terhormat Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Izin Pimpinan, izin Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Eddy, silakan Pak Eddy.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Sedikit aja, ada yang, ini sangat penting saya kira.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Kaitanya dengan Cipta Karya, sanitasi, Bu. Jadi kita ini kan saya lihat bukan ini sudah di mana-mana gitu, sungai gitu ya, kita melihat ini masalah lingkungan, sungai dan sekitarnya daerah pengaliran sungai atau daerah aliran sungai, itu jangankan di, di luar Jawa ya, di Jawa saja, di Jawa Barat yang hanya 60 kilometer dari Jakarta, seperti Ciliwung itu kotornya bukan main, Bu, limbahnya, luar biasa itu, pertama sampah, membuang sembarangan tetap di sampah itu sungai itu jadi pembuangan, tempat pembuangan sampah.

Kemudian juga limbah, limbah rumah tangga dan limbah ini. Saya iri sebetulnya membandingkan dengan, dengan Bangkok ya, sungai Chao Phraya gitu, *nggak* ada, Bu, di situ *nggak* ada yang dibuang langsung ke sungai, semua diolah, 15 tahun yang lalu tuh 80% Bangkok itu diolah, jadi ada IPAL-nya 80% ya sudah diolah, saya lihat memang di pinggir, rumah di pinggir sungai bagus-bagus *nggak* ada langsung membuang kotoran di sungai gitu. *Nah*, sementara kita ya termasuk di, di lingkungan tempat saya Bu, di Ciawi di mana itu, itu memang ada, toilet ada gitu, tapi pipanya itu langsung ke sungai, *nggak* ada pengolahan, tidak ada septik tank itu *nggak* ada. *Nah*, itu apakah ini tidak ada program yang secara nasional ini yang harus dilakukan apa ya, lihat dulu aja secara yang dekat-dekat saja itu, itu air Ciliwung itu, Sungai Ciliwung alirannya ke istana itu, Istana Bogor, melewati tempat saya itu, kotornya bukan main itu, sampahnya di situ.

Nah, mohon ini juga dibina gitu ya, mungkin ada juga program TPS3R, tapi yang cocok untuk, jangan disamakan, Bu, yang cocok untuk setempat gitu ya, beda-beda mungkin di situ, mungkin *nggak* ada lahan disitu ya yang 80 meter, 100 meter untuk TPS3R ya, tapi harus, ini harus, kita sudah harus mulai dan kalau perlu kita belajar di mana-mana itu, di Bangkok, di China, di Shanghai itu ada museum rehabilitasi sungai. Jadi sungainya dulu sangat kotor, hitam tapi jadi bersih sekali gitu dan itu dicanangkan oleh Presiden Republic of China. *Nah*, ini ni, kita inginnya seperti itu juga.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Iqbal.

F-PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Ketua.

Yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian,

Saya menghemat saja *nih*, Pak Ketua, penghormatannya.

Yang pertama, ke Ibu Dirjen Cipta Karya, di sini kalau saya melihat anggaran Ibu itu ada kenaikan, Bu ya, kenaikan sebesar 4,68 triliun dari 2003 itu 2,8 sekarang 32 triliun. Tentu kenaikan ini sangat kita apresiasi dan sangat wajar kalau melihat dari program-program yang akan Ibu lakukan tahun 2024 ini saya melihat banyak sekali yang akan dibangun, mulai dari lapangan bola, kemudian sekolah dan lain-lain sebagainya, pasar. Saya kira itu hal yang sangat bagus sekali, mudah-mudahan program itu ke depannya bisa berjalan lancar.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan padat karya nih, Bu. Konsep dari padat karya itu kan bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat, ada uang negara kemudian dikelola oleh masyarakat, masyarakat bisa mendapat manfaat, masyarakat mengerjakannya dapat upah kemudian hasilnya untuk masyarakat. Untuk tahun 2023 sebagian besar program padat karya yang dari Direktorat Ibu mungkin teman-teman juga sudah mengatakan tadi, sudah banyak selesai dan tentu kita berterima kasih sekali, Bu.

Tetapi persoalannya, Bu, untuk tahun 2024 ini program padat karya ini kan salah satu program yang saya kira sangat baik ya, tadi seperti saya katakan untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. *Nah*, kalau saya melihat alokasinya, teman-teman tadi banyak mengatakan sepertinya ada penurunan, Bu, penurunan program padat karya tadi, padahal kalau anggarannya kita melihat itu hampir sama atau kalau saya tidak salah malah naik ini tahun 2024 untuk program padat karya, seperti misalnya PISEW ya. PISEW itu, PISEW ya PISEW itu tahun 2023 ini saya dapat data 12 Juni 2023 ada 1.340 kecamatan, tahun 2024 di sini hanya 738 lokasi, artinya ada penurunan, hampir separuh ya Pak ya, hampir separuh. Kemudian juga Sanimas 2023 1.890, 2024 hanya 1.546, sama juga dengan sanitasi pendidikan, tahun 2023 1.550, di sini hanya 1.279, begitu juga yang lainnya. *Nah*, padahal sesuai dengan kesepakatan waktu kita Raker dengan Pak Basuki, tadi teman-teman sudah menyampaikan ada poin empat *nih*, Bu, saya bacakan kesimpulannya. "Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk menambah alokasi anggaran pada program padat karya tunai tahun 2024 minimal sama dengan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya", kemudian ditandatangani oleh Pak menteri dan Pak Ketua Pak Lasarus. *Nah*, mengapa kami meminta minimal sama atau kalau memungkinkan ditambah. Banyak teman-teman mengatakan tadi bukan persoalan Pemilu bukan, benar Bu, tetapi persoalannya adalah padat karya ini masyarakat banyak berterima kasih kepada kami, mereka yang mungkin tidak punya pekerjaan ada program, mereka bisa berpenghasilan, kemudian setelah itu juga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, maka dari itu kami berharap ke Ibu Dirjen kalau bisa ini bisa disamakan sesuai dengan permintaan teman-teman, apalagi sudah sesuai dengan kesepakatan rapat kita pada tanggal 30 dengan Pak Menteri. Saya kira itu Bu ya, mudah-mudahan bisa di, di apa, menjadi catatan Ibu.

Kemudian ke Pak Dirjen Bina Konstruksi. Tadi teman-teman juga sudah mengatakan banyak sekali beberapa, saya kira beberapa persoalan lah ya tentang pemenang tender yang kadang-kadang yang harganya murah dimenangkan, kadang-kadang yang harganya sedang dimenangkan, saya juga

bingung, standarnya itu seperti apa sebenarnya, Pak. Ada teman-teman dulu mengatakan yang paling murah dimenangkan atau tidak, saya tidak ikut campur ke sana, saya hanya meminta tanggapan dari Pak Dirjen. Saya berharap ada mekanisme yang lebih baik lagi, apalagi kalau sudah *e-katalog* semua itu malah lebih baik lagi, Pak.

Kemudian yang kedua, ini persoalan apa, Pak, program apa *tuh* pelatihan ya, yang tadi Bapak sampaikan mengenai apa uang *transport* bagi peserta, berkisar antara 85.000 tadi ya sampai 120.000. Kalau memungkinkan jika anggarannya ada kalau bisa ditambah, Pak, ditambah karena kalau 85.000 dia pesertanya agak jauh, bensin saja sudah habis berapa? apalagi kalau Pertalite dihapus, mereka harus pakai Pertamina, sementara lokasi kan itu kalau *nggak* salah dua hari itu bolak-balik, mereka tidak bisa menginap katanya dengan anggaran terbatas, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan bagi Pak Dirjen.

Saya kira itu, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Iqbal.

Pak Ilham, ada? cukup ya, baik, kita sedikit Bu Dirjen, kalau Pak Dirjen kan berjalan baik semua saya lihat ya, berjalan baik anggaran diminta di situ.

Bu Dirjen untuk saya, Dapil saya di Kabupaten Muna itu, Pak, Bu Dirjen, itu persoalan SMP 4, SMP 4 yang pada saat itu dengan *anu* dengan Bu Dirjen jawab itu, sama Kepala Balai sudah saya pernah tinjau, Pak, Bu di sana. Saya mohon itu menjadi perhatian karena sudah, sudah parah sekali, sudah parah dan saya takut rubuh bangunannya, kemudian nanti ada korban lagi di situ.

Yang berikutnya adalah pasar. Pasar juga pernah saya bermohon dan bahkan surat dari Menteri Perdagangan juga sudah ada ke Kementerian PUPR.

Dan yang berikutnya adalah lanjutan dari landasan yang dalam pelaksanaan sekarang ini, sama itu menjadi perhatian dari Ibu Dirjen. Hanya itu aja Bu Dirjen. Kami beberapa waktu yang lalu kita ada kunjungan di BUMDes Binamangun Jati unggul, tempatnya, tempatnya di Desa Jatirejo, Kabupaten Kulan Progo, mereka ada usulan penataan Kawasan Bukit Cubung. Jadi minta waktunya Bu Dirjen, saya serahkan langsung *nih*, ya nanti Bu Dirjen pelajari sendiri layak atau tidak di bantu, bentar saya serahkan dulu, Pak ya.

Itu Dapilnya Pak Djadi ya?

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Tetangga.

KETUA RAPAT:

Tetangga ya, kita Kunker pada waktu itu.

Baik.

Dari Pimpinan juga sudah selesai, dari Anggota sudah selesai maka sekarang kita minta tanggapan dari Pak Dirjen maupun Bu Dirjen. Cuma begini, saya lihat yang bertanya ini sudah hampir semua pulang, jadi nanti dijawab tertulis saja tapi kalau ada yang penting-penting yang masih ada saja yang dijawab, kalau yang sudah pulang *nggak* usah dijawab lagi karena percuma dijawab *nggak* ada orang.

Ya silakan Bu Dirjen duluan barangkali, silakan.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Kami akan mencoba merespon hal-hal yang tadi disampaikan kepada kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan *me-review* kembali dari apa yang sudah kami sampaikan untuk anggaran tahun 2024.

Yang pertama, Bapak, bahwa apa yang kami sampaikan tadi sebenarnya sama seperti apa yang disampaikan Bapak Menteri PUPR pada saat Raker tanggal 30 Agustus 2023 yang lalu, termasuk juga besaran untuk yang padat karya, infrastruktur yang berbasis masyarakat ya. Kami masih belum melakukan perubahan, namun demikian kemarin kami sudah rapat dan kami sedang melakukan *exercise*, Bapak, sedang melakukan *exercise* untuk besaran dari IBM ya untuk masing-masing sektor ini ya. Mudah-mudahan nanti setelah kami lakukan *exercise* bersama-sama dengan seluruh Unor dan nanti tentunya seluruh PUPR, dengan persetujuan Bapak Menteri nanti akan ada perubahan-perubahan tersebut yang akan kita lakukan.

Dan kemudian terkait dengan kriteria penanganan tahun 2024, memang di sini kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini adalah untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang sudah *committed* atau MYC di mana tentunya semua yang sudah berjalan tinggal kita lakukan dan untuk kegiatan baru memang harus mendapatkan persetujuan dengan Bapak Menteri PUPR dan *readiness criteria*-nya tentunya juga harus benar-benar sudah siap ya dan

kami memprioritaskan lanjutan atau penyelesaian dari kegiatan tahun 2023 agar tidak mangkrak, Bapak ya, agar tidak mangkrak dan tentunya kami juga me-inikan untuk masalah serah terima aset itu juga mesti harus gini dan juga kegiatan di 2024 ini harus memperhatikan dari apa yang direktif, kemudian juga harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Menteri ya.

Kemudian Ibu, Bu Restuwati dan juga Pak Syahrul tadi menyampaikan terkait dengan masalah PISEW ya. PISEW ini memang sejak tahun 2022, Ibu, tidak lagi menggunakan indeks desa membangun dari Kemendes ya, artinya sejak tahun 2022 seluruh status desa itu dimungkinkan Ibu untuk masuk atau mendapatkan program dari PISEW. Ada satu hal catatan yang mungkin perlu kami sampaikan Sanimas, Sanimas ini memang disebutkan ODF dan juga desa ini tertinggal. Namun demikian, kami akan mencoba me-review, Ibu, dari aturan-aturan yang ada sehingga untuk semua desa kami bisa mendapatkan untuk Sanimas ini

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Nggih.

ODF nanti yang tertinggal ini mungkin mudah-mudahan kami akan bisa *review* untuk kita semua desa-desa ini.

Kemudian menanggapi apa yang disampaikan Pak Fadholi tadi bahwa LPK, Bapak. LPK itu kemarin kami juga sudah memberikan catatan kepada Bapak Menteri bahwa tidak hanya pondok pesantren saja, tapi untuk semua agama itu bisa ya, diizinkan ya, dan tidak hanya pondok pesantren, ada beberapa sekolah-sekolah yang memang ini kemarin ada yang catatan bermukim tapi tahun ini yang bermukimnya itu juga berbeda-beda, tapi juga modelnya nanti juga berbeda. Jadi kami akan mencoba untuk ini kan, ini sudah kita lakukan di tahun 2023 ini.

Izin, Bapak, terkait dengan Bapak Muhammad Aras yang UNM, Pak. UNM ini mohon izin masih perlu ada beberapa persyaratan yang perlu kami inikan, Pak, kami mohon dibantu, Pak, mohon dibantu untuk kami nanti bisa menyelesaikan, apa, melaksanakannya. Izin, Bapak, untuk hal ini nanti kita sampaikan kepada Bapak untuk apa data-data RC-nya yang pasti harus diselesaikan, Bapak.

Kemudian Pak Eddy Santana, oh sudah *nggak* ada, sudah *nggak* ada. Untuk masalah *timeline* ini tentunya untuk semuanya terima kasih kalau memang ini bisa dipercepat, ini juga mempermudah kami juga, artinya data-data sudah masuk semuanya sehingga nanti SK di Januari atau di Desember

sudah ini ya akan lebih, kami lebih enak sehingga Januari atau Februari kami tinggal bekerja, Bapak ya, kami sepakat untuk hal itu.

Kemudian tadi juga Pak Eddy Santana untuk sungai, sanitasi sungai. Sebenarnya kami sudah ada program Citarum Harum ya, Citarum Harum ya itu saya informasikan aja namun mungkin karena Pak Eddy Santana nya *nggak* ada jadi kami informasikan Citarum Harum sudah ada ya. Mudah-mudahan nanti di kota-kota lain bisa ada program seperti itu juga.

Kemudian untuk tadi Bu Estu sudah, kemudian Pak, Pak Sudjadi, terima kasih Pak Sudjadi, mudah-mudahan nanti kami bisa hadir pada acara tersebut dan khususnya untuk Borobudur. Saat ini Borobudur ini sedang kami proses untuk pengelolaannya dan saat ini mungkin sudah ada *in journey* ya, Pak ya, *in journey* dan juga sudah ada persiapan juga bersama-sama dengan TWC untuk pengelolaan tiga gerbang tersebut. Mudah-mudahan nanti kami akan selalu berkoordinasi dengan *stakeholder* dan Pemda terkait untuk mengoptimalkan pengelolaan dari KSPN yang ada, mungkin tidak hanya Borobudur tapi seluruh KSPN yang ada di Indonesia, ada lima dan tambah lima lagi nanti.

Kemudian Pak Ridwan Bae, terkait dengan Muna oke, nanti kami coba tinjau kembali, Bapak, mungkin kami akan cek *readiness criteria* nya juga mudah-mudahan bisa ini. Penataan Nagasa mungkin hanya di 2023 ya, Bapak, ya izin untuk 2023. SMP 4 sudah kami survei dan mungkin nanti kami akan buat DED-nya demikian.

Mudah-mudahan itu kalau Pelalawan tadi sudah ya Pak Syahrul ya, sudah kita masukkan.

Bu Cen, untuk krematorium juga sudah juga. PISEW tadi sudah kami sampaikan, jadi tidak ada persyaratan harus desa tertinggal dan desa ODF atau BUN, jadi semuanya bisa masuk Bapak, *nggih*. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan.

Pak Iqbal, saya pikir, di awal tadi sudah kami sampaikan, kami sedang melakukan *exercise*, Pak, untuk penghitungan IBM itu.

Demikian Bapak kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih. Oh Pak Syahrul.

KETUA RAPAT:

Silakan-silakan.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.):

Pak Ketua, izin.

Bu Dirjen, di Kampar, di Provinsi Riau itu ada Candi Muara Takus, itu potensi yang luar biasa sebetulnya. Saya iri juga selalu setiap rapat itu hanya candi-candi itu saja yang disebutkan, ini ada yang belum tergali potensinya. Saya minta, Bu, kalau ada tim dari Cipta Karya atau Ibunya yang turun saya ajak ke Candi Muara Takus, Bu. Saya tidak berpikir hanya sekarang dalam waktu dekat ya, tetapi setidaknya ada kepemimpinan berikutnya itu kan tentu yang mengetahui *nih* Bapak-Bapak yang ada di sini *nih* di kementerian, maksud saya ini jadi bahan, saya izin mengundangnya dari Cipta Karya untuk hadir di Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar di Candi Muara Takus membuat penataan dari awalnya perencanaannya, potensi luar biasa, Ibu.

Terima kasih. Tadi sudah saya masukkan juga dalam surat saya agar ini perlu turun bersama kita ya.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik.

Terima kasih, Bapak.

Nanti mungkin Ka.Balai dan juga teman-teman dari Direktorat PKP, Pak, di sini ada Pak Wahyu, mungkin nanti bisa timnya bisa turun bersama-sama Ka.Balai dan Bapak ke Candi Muara Takus ya.

Oh iya, ada satu lagi yang saya kelupaan masalah progres IKN tadi Pak Syahrul juga yang menanyakan. Progres IKN sebenarnya secara total itu sudah berkisar angka 40-an, Bapak, ini kami coba lihat, kita bagi menjadi tiga, dua ya, *batch* 1 itu tahun 2020 sampai 2023 ini kira-kira sudah 40 paket yang kita lakukan dan progres fisiknya 43,3%. Kemudian *batch* kedua untuk 2023 dan 2024 itu ada 39 paket, bukan hanya di Cipta Karya tapi secara keseluruhan, ini kira-kira masih sekitar 1% nya, dan mudah-mudahan nanti bisa segera kita menyusul untuk penyelesaiannya dan bulan Juni itu Bapak Menteri menyampaikan bahwa saya harus tinggal di sana. *Nah*, ini kami akan melakukan percepatan-percepatan untuk itu.

Mungkin demikian Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak sekalian, kurang lebihnya kami mohon arahan selanjutnya.

Terima kasih, dan

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen silakan, Pak Dirjen.

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA, M.Eng):

Baik.

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota yang saya hormat,

Saya coba me-review tanggapan-tanggapan dari Bapak-Ibu semua.

Pertama, barangkali dari Pak Sumail dan Pak Syahrul Aidi tadi ya terkait dengan pengutamaan pengusaha lokal dan *blacklist* orang. Ini kedua hal tersebut sudah kami sampaikan Pak Syahrul, kepada LKPP selaku regulator pengadaan barang dan jasa, Bapak ya. Ini mudah-mudahan kedua hal tersebut bisa masuk di dalam proses revisi Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Bapak, karena memang kami tidak bisa merubah sendiri tanpa persetujuan dari LKPP, Bapak, tapi ini sudah kami sampaikan terus isu-isu tersebut ya.

Kemudian tadi dari Bu Sadarestu, kemudian dari Pak Aras, kemudian dari Pak Fadoli dan Pak Iqbal sebagian ini rata-rata terkait dengan proses pengadaan barang jasa yang kurang pas sehingga didapatkan pemenang yang kurang *qualified* ya itu ya seperti itu ya, atau penawaran rendah ya. *Nah*, ini terkait dengan penawaran rendah bahwa pada prinsipnya memang pemenang adalah harga terbaik yang memenuhi syarat ya, jadi baik syarat administrasi, teknis maupun harga. *Nah*, pada saat penawaran kurang dari 80%, kita lakukan evaluasi kewajaran harga ya. *Nah*, PUPR sudah menerbitkan SE Nomor 19 tentang Evaluasi Kewajaran Harga. *Nah*, jika hasil evaluasinya wajar, jaminan pelaksanaannya kita naikin menjadi 5% dari penawaran, dari HPS mohon maaf, biasanya dari penawaran, kemudian jika terbukti harga tidak wajar kita gugurkan ya, jadi memang sudah buat seperti itu.

Kemudian terkait dengan sanksi bagi perusahaan yang tidak menghasilkan produk yang berkualitas, *nih* kita memang mendorong unit organisasi ya terutama Direktorat Jenderal-Direktorat Jenderal yang terkait untuk bisa mengevaluasi kinerja penyedia jasa yang bisa dilakukan dalam sistem SIKAP atau Sistem Informasi Kinerja Penyedia yang dikelola oleh LKPP. *Nah*, kami mendorong terus teman-teman dari organisasi untuk bisa memanfaatkan sistem ini sehingga kita bisa mendapatkan kinerja dari penyedia jasa dan kita bisa melakukan tindakan apabila kinerjanya tidak sebagaimana yang kita harapkan.

Kemudian ada pertanyaan spesifik tadi dari Bu Cen Sui Lan, terima kasih Bu Cen, terkait dengan tukang las untuk kapal ya Bu, Bu Cen ya, kami coba latihnya las umum dulu barangkali Bu Cen ya, atau nanti barangkali ada kurikulum yang spesifik dari apa, dari las kapal ini yang bisa kita masukkan di dalam silabus kita ya.

Demikian juga tadi dari Pak Eddy Santana terkait dengan apa kedisiplinan, Bapak ya. Memang itu masuk di dalam silabus K3, Bapak, tapi barangkali kami akan *review* kami akan lihat apakah sudah cukup, Pak, jam pelajarannya terkait dengan kedisiplinan itu, Pak.

Kemudian terkait dengan bagaimana tenaga kerja-tenaga kerja yang sudah kita latih gitu, Pak. Memang kami sudah berkomunikasi dengan para Direktur Jenderal, Pak, ya terutama dengan SDA Bina Marga, Bu Dirjen Cipta Karya dan Perumahan untuk bisa memanfaatkan tenaga kerja konstruksi yang sudah kita latih, Pak, yang digunakan di teman-teman unit organisasi, Pak. Jadi barangkali dengan didorong oleh Pak Eddy yang melakukan anjangsono apa ke teman-teman Balai barangkali ini akan lebih kuat lagi, Bapak. Jadi kami akan menyurati kepada teman-teman Direktorat Jenderal untuk bisa memanfaatkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat yang sudah kita latih, yang *Insyah Allah* dengan kita menggunakan hal tersebut akan didapatkan hasil yang lebih baik.

Kemudian terkait dengan tenaga kerja konstruksi juga yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil, Pak Iqbal, Pak, jadi izin Bapak bahwa sementara kami menggunakan SBM yang ada, Bapak ya, tetapi kami sedang mengajukan ke Kementerian Keuangan untuk membuat SBML khusus, Pak, sehingga transportnya ini bisa lebih membaik, Pak, tapi saat ini, Pak, sudah ada SBM 2024 yang relatif angkanya lebih baik, Pak, dibandingkan dengan 2023. Kalau di 2023 adalah antara 85.000 sampai dengan 110.000 ya, *nah*, sekarang dari 110.000 sampai 170.000, Pak. Ini memang masih belum memadai, Pak, tapi masih lebih baik, Pak, barangkali ada komponen-komponen lain yang bisa kita tambahkan sehingga minimum kesenjangan yang didapatkan oleh tenaga kerja konstruksi pada saat mereka pelatihan bisa kita minimalisir, Bapak.

Saya kira, oh ya satu terkait *e-katalog*, Ibu, Ibu Sadarestu izin saya melaporkan, udah *nggak* ada Bu Estu tapi intinya bahwa proses terkait dengan *e-katalog* ini sudah cukup besar dengan adanya yang di Inpres Jalan Daerah, Pak, hampir senilai 11,8 triliun, tapi dengan demikian kita juga tetap selalu mengingatkan, Pak, kepada teman-teman dari Dirjen Bina Marga terkait dengan prinsip kehati-hatian proses *e-katalog* ini, Pak. Jadi karena harus tetap diwaspadai, jangan sampai kita lalai ya, karena demikian mudahnya seolah-olah kita menjadi lalai, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada proses-proses *e-katalog* yang ada di Kementerian PUPR.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu semua, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nanti secara lengkap akan kami sampaikan secara tertulis kepada Bapak-Ibu semua.

Terima kasih.

Saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan.

INTERUPSI F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Interupsi, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

Hanya sedikit meluruskan Pak, saya tadi nyampaikan tidak, tidak harus orang daerah, itu kan hak semua orang ya. Saya, yang saya ingin luruskan bahwasanya jangan ada ucapan dan ungkapan dari Kepala Balai untuk rasis. Kalau ada sebuah, satu orang kontraktor yang tidak beres jangan bawa-bawa daerahnya, kalau dia tidak tak beres, tidak becus *blacklist* makanya saya bilang *blacklist* orangnya dan *blacklist* perusahaannya, tapi jangan bawa-bawa daerah begitu, hanya karena orang kontraktornya dari daerah A kemudian dia katakan *nggak* boleh, pokoknya kasih, jangan kasih proyek sama orang dari Kampar. *Nah*, itu tidak boleh itu, apalagi muncul dari seorang pejabat di kementerian itu tidak boleh. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, siapa saja boleh untuk mendapatkan proyek itu, kita *ahlan wa sahan* saja dari di, di Riau itu, Pak, cuma bawa-bawa daerah, saya tidak setuju itu.

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA, M.Eng):

Izin, Bapak Pimpinan mohon maaf, Pak, saya agak terlewat Bapak untuk mengomentari Bapak, Pak. Jadi intinya barangkali atas laporan Bapak terima kasih, Bapak. Nanti akan segera kami panggil, Pak, Kepala Balainya. Kalau perlu saya meminta maaf kepada Bapak, Pak, sekarang ya atas ucapan yang kurang pas ya, Pak, segera akan kami tindak lanjut aturan berlaku Bapak.

Terima kasih, Pak Aidi.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Djadi, silakan.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Saya hanya mohon kepada Pak Dirjen bahwa sertifikat itu *mbok* kira-kira *ndak* usah 1 minggu sudah keluar, walaupun pembuat sertifikat itu badan resmi lain karena kebetulan di Dapil saya yang langsung itu ada tiga proyek

yang rata-rata itu antara 20 sama 30. Jadi saya bisa titip mereka ke Balai, oh ini hasil ini tolong apa, tolong apa, ini jadi maksud saya ada manfaatnya.

Gitu aja, Pak *nggih*, syukur kalau harga sertifikat itu bisa diturunkan, kasihkan peserta pelatihan gitu.

KETUA RAPAT:

Oke, makasih ya. Baik, sekarang kita sampai pada kesimpulan, tolong ditayang ya.

**DRAF KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN CIPTA KARYA DAN DIRJEN BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PUPR
RABU, 6 SEPTEMBER 2023**

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR mengenai rencana kerja dan anggaran masing-masing unit organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - a. Ditjen Cipta Karya Pagu kebutuhan untuk tahun, Tahun Anggaran 2024 yaitu Rp32.455.360.000.000,00. Nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp32.704.222.429.000,00, selisihnya, penambahan ya penambahan adalah Rp288.862.429.000,00;
 - b. Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp692.054.926.000,00. Nota keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp590.518.956.000,00, selisihnya Rp101 miliar kurang lebih.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan masing-masing unit organisasi Eselon I pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan saran, pendapat serta usulan Komisi V DPR RI dalam rangka rapat pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk menambah alokasi anggaran program padat karya Tahun Anggaran 2024.

Bagaimana Komisi V, Anggota yang terhormat, setuju?

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Saya usul, Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Dalam sejarah saya 10 tahun lebih saya jadi Anggota, tidak ada lembaga apapun yang anggarannya naik, tapi kali ini Cipta Karya naik, jadi contoh, *anu* tolong dicatat itu *tuh*, itu peristiwa aneh sedunia, Pak.

F-PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Berarti padat karya harus nambah, Pak ya.

KETUA RAPAT:

Berarti sudah cocok, Pak ya, sudah cocok ya. Komisi V sudah setuju bagaimana dengan dari pemerintah, Bu Dirjen Cipta Karya setuju?

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju ya, Bu-Pak setuju? baik kita ketok sebagai tanda setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Iya, sebelum acara rapat ditutup, kita minta sambutan akhir atau salam penutup dari Pak Dirjen atau Bu Dirjen ini.

Silakan aja.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik, ini katanya yang alokasinya besar yang ngomong, Pak, mohon maaf.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang kami hormati tentunya Pimpinan dan para Anggota Komisi V DPR RI yang saya banggakan,

Kami mengucapkan terima kasih Bapak atas masukan, saran dan pendapat yang telah disampaikan di dalam rapat dengar pendapat hari ini, kami nanti akan mencoba melakukan penyempurnaan dari program-program kami di tahun 2024, baik di Cipta Karya maupun di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, tentunya semuanya ini adalah niat baik kita dan juga untuk

masyarakat Indonesia, ya bangsa Indonesia agar ini juga bisa menjadi amanah dan juga menjadi niat baik kita untuk bangsa dan negara kita.

Mungkin itu aja.

Terima kasih, Bapak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Kami juga, saya dan Pak Iqbal atas nama Pimpinan sekaligus atas nama Anggota yang terhormat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan, tapi apa yang kita lakukan itu, semua ini dilakukan buat negara dan bangsa kita semua.

Kita tutup acara ini dengan ucapan *bismillahirrahmanirrahim*.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.28 WIB)

JAKARTA, 6 September 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002